

**KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENERAPAN KAMPUNG TANGGUH  
SEMERU DI DESA KERTOSARI KECAMATAN KUTOREJO  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana S1 Ilmu Politik  
(S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh:**

**NUR ASKHABUL KAHFI**

**NIM : I01218030**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
TAHUN 2023**

## LEMBAR PERTANGGUNG JAWABAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Askhabul Kahfi

Nim : I01218030

Program Studi : Ilmu Politik

Judul skripsi : "Komunikasi Politik Dalam Penerapan Kampung Tangguh Semeru Di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto."

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian dari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 11 Oktober 2022

Yang menyatakan



Nur Askhabul Kahfi

NIM. I01218030

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan serta koreksi terhadap penulisan proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Ashabul Kahfi  
NIM : I01218030  
Program Studi : Ilmu Politik

Dengan judul “Komunikasi Politik Dalam Penerapan Kampung Tangguh Semeru Di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto”.

Saya berasumsi bahwa proposal skripsi dengan judul diatas bisa diajukan untuk segera diseminarkan.

Surabaya, 28 Januari 2022

Pembimbing



**Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si**  
NIP. 1969090719940320001

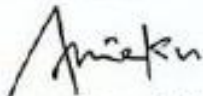
## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini disusun oleh Nur Askhabul Kahfi NIM. 101218030 dengan judul: "Komunikasi Politik dalam Penerapan Kampung Tangguh Semeru di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto", telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Politik.

### TIM

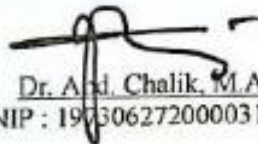
#### Penguji Skripsi

##### Dosen Penguji I



Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si  
NIP : 196909071994032001

##### Dosen Penguji II



Dr. Abd. Chalik, M.Ag  
NIP : 197306272000031002

##### Dosen Penguji III



Nur Rohman, M.A.  
NIP : 198510192015031001

##### Dosen Penguji IV



Ajeng Widya Prakasita, M.A.  
NIP : 199502232020122025

Surabaya 11, November 2022

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan,



Abd. Chalik, M.Ag

7306272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR ASKHABUL KAHFI  
NIM : I01218030  
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / ILMU POLITIK  
E-mail address : nuraskhabulkahfi16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Komunikasi Politik dalam Penerapan Kampung Tangguh Semeru di Desa Kertosari  
Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Mei 2023

Penulis  
  
(Nur Askhabul Kahfi)

## ABSTRAK

**Nur Askhabul Kahfi, 2023, *Komunikasi Politik Dalam Penerapan Kampung Tangguh Semeru Di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto*, “Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”.**

Kata Kunci : Komunikasi Politik, Pemerintah Desa, COVID 19

Kampung Tangguh Semeru adalah program yang di inisiasi oleh Polisi Daerah (POLDA) Jawa Timur yang kemudian di adaptasi di tiap-tiap daerah untuk mengurangi penyebaran Pandemi COVID-19 di Wilayah Jawa Timur. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul “Komunikasi Politik dalam Penerapan Kampung Tangguh Semeru di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana komunikasi politik dalam penerapan kampung tangguh semeru di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara kepada perangkat Desa Kertosari dan beberapa masyarakat Desa Kertosari. Selain itu juga memakai teknik dokumentasi untuk mendapatkan sumber dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis menggunakan teknik kualitatif yang kemudian disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit mengenai komunikasi politik dalam penerapan kampung tangguh semeru di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya data tersebut diolah dengan memakai dua tahap yaitu *editing* dan pemilihan data yang relevan dengan penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan *organizing*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dari pemerintah Desa Kertosari dalam menerapkan kampung tangguh semeru sudah cukup efektif untuk menanggulangi COVID-19 karena masyarakat patuh terhadap arahan dari Kepala Desa. Masyarakat juga memiliki antusias tinggi untuk bekerjasama melawan penyebaran virus corona yang berada dalam desanya sendiri. Berdasarkan hasil analisis penulis komunikasi politik pemerintah Desa Kertosari dalam menerapkan kampung tangguh semeru sudah cukup efektif. Hal ini ditandai dengan tingginya antusias masyarakat dalam menjalankan kampung tangguh semeru dan berjalannya program kampung tangguh semeru dengan baik. Meskipun masih terdapat masyarakat yang meremehkan program tersebut namun pemerintah Desa Kertosari berusaha membuat berbagai macam strategi untuk memaksimalkan program kampung tangguh semeru tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, saran yang diberikan oleh penulis adalah seharusnya Pemerintah Daerah memberikan bantuan dari segi finansialnya bukan hanya dari segi SDM saja. Karena suatu program pastinya membutuhkan materi untuk bisa dijalankan secara tepat dan cepat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERTANGGUNG JAWABAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Konseptual.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK</b> .....	17
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kerangka Teori.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	38
A. Pendekatan Penelitian .....	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	39
C. Pemilihan Subyek Penelitian.....	40
D. Tahap-Tahap Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	45
G. Teknik Keabsahan Data .....	46

<b>BAB VI PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b> .....	48
A. Deskripsi Penelitian.....	48
B. Data dan Analisis Komunikasi Politik Pemerintah Desa dalam Menerapkan Kampung Tangguh Semeru.....	53
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	86
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	89
A. Pedoman Wawancara .....	89
B. Surat Keterangan Penelitian .....	90
C. Surat Bebas Plagiasi .....	92
D. Dokumentasi Penelitian.....	93
E. Biodata Peneliti .....	94

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR TABEL

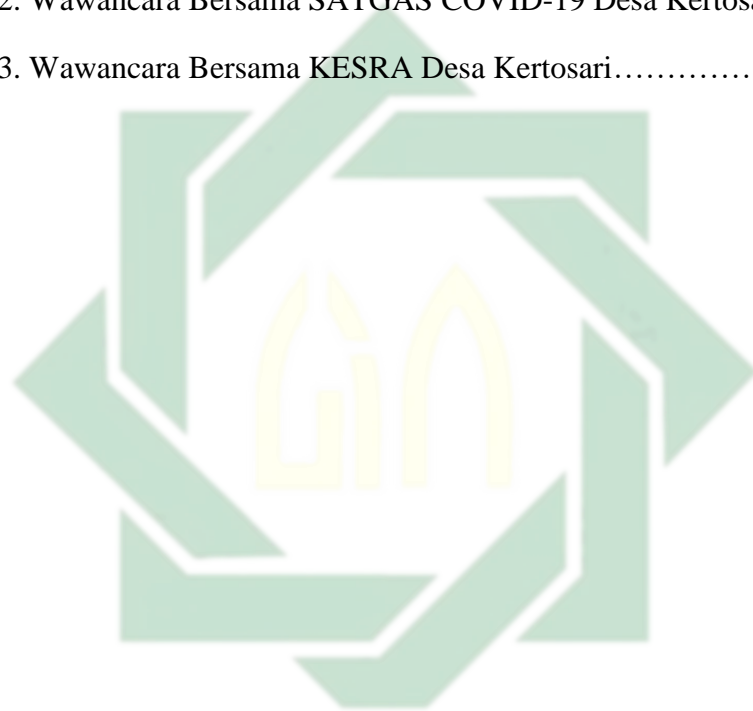
Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Kertosari.....	37
Tabel 4.2 Tabel Penduduk Desa Kertosari.....	38
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk.....	38
Tabel 4.4 Mata Pencarian Pokok .....	39
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut.....	39



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara Bersama lurah kertosari.....	69
Gambar 2. Wawancara Bersama SATGAS COVID-19 Desa Kertosari.....	69
Gambar 3. Wawancara Bersama KESRA Desa Kertosari.....	70



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Perangkat Desa Kertosari.....	37
--	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 2019 tepatnya sekitar akhir bulan Desember tahun 2019, seluruh belahan dunia dihadapkan dengan suatu peristiwa yang membuat seluruh masyarakat dunia resah. Peristiwa tersebut yaitu menyebarnya berasal dari virus yang dikenal dengan sebutan Corona Virus Disease. Peristiwa tersebut pertama kali muncul dikota Wuhan, Tiongkok. Pada awal mulanya diduga virus ini berasal dari pasar grosir makanan laut yang banyak memperjual belikan jenis hewan hidup atau setengah matang. Namun, ketika diteliti ternyata virus ini belum tentu berasal dari pasar grosir makanan laut tersebut. Virus ini penyebarannya sangat cepat dalam negeri China tersebut, bahkan pada awal tahun 2020 penyebaran virus ini mulai masuk ke Indonesia.

Pada sekitar tanggal 18 sampai 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Sejak tanggal 31 Desember 2019 hingga tanggal 3 Januari 2020 kasus ini meningkat dengan sangat pesat, hal ini ditandai dengan adanya laporan kasus sebanyak 44 kasus<sup>1</sup>. Adapun, hewan-hewan yang diduga menjadi penyebab munculnya virus ini COVID-19 ini belum dapat diketahui dengan jelas. Sedangkan berdasarkan bukti secara ilmiah, virus COVID-19 ini bisa menular dengan

---

<sup>1</sup> Simela Victor Muhamad, "PANDEMI COVID-19 SEBAGAI PERSOALAN SERIUS BANYAK NEGARA DI DUNIA" Vol. XIII, No. 13/I/Puslit/Juli/2021

antar manusia seperti melalui percikan batuk, bersin (*droplet*), bahkan melalui kontak dengan jabat tangan.

Orang yang memiliki resiko tinggi tertular virus ini adalah orang yang pernah memiliki hubungan erat dengan pasien COVID-19 termasuk orang yang merawat pasien COVID-19 atau tenaga kesehatan seperti perawat, dokter dan lain-lain. Adapun gejala yang dialami atau tanda awal terpapar infeksi virus COVID-19 ini adalah mulai dari gejala gangguan pernapasan seperti demam, batuk, kelelahan, peradangan, kehilangan fungsional indera perasa hingga sesak nafas. Sedangkan masa inkubasi terinfeksi gejala virus ini biasanya terjadi 5 sampai 6 hari dengan masa inkubasi batuk, kehilangan fungsional indera perasa, demam dan sesak napas. Bahkan virus COVID-19 dapat menyebabkan penyakit pneumonia, gagal ginjal, sindrom pernapasan akut, dan bahkan hingga kematian.<sup>2</sup>

Sejak pertama kalinya COVID-19 mulai masuk ke Indonesia yang mulai diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, jumlah pelaporan kasus terinfeksi COVID-19 terus meningkat sangat pesat dan mulai tersebar di hampir seluruh Provinsi Indonesia. Meningkatnya pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini menjadikan Pemerintah untuk mengambil keputusan melalui kebijakan, seperti misalnya Pembatasan Sosial Bersekala Besar yang kemudian dikenal dengan istilah “PSBB”. Kebijakan tersebut adalah salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai salah satu cara memutus mata rantai

---

<sup>2</sup> Putri Noviyanti Ririn, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 20 No. 2 (Juli 2020): 704.

penyebaran virus COVID-19. Kebijakan pemerintah tersebut kemudian melibatkan semua *stakeholder* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam pelaksanaannya.

Dalam mengatasi hal tersebut dengan tujuan untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus corona di ruang lingkup kecil yaitu desa, pemerintah desa melakukan kinerja secara maksimal dengan mengadopsi inovasi dari Polda Jawa Timur guna membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai COVID serta menciptakan suatu warga di Desa atau Kelurahan yang lebih disiplin guna mentaati protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh pemerintah agar bebas dari paparan infeksi virus COVID-19.<sup>3</sup>

Pemerintah desa termasuk dalam salah satu bagian dari pemerintahan yang cakupan kepemimpinannya seputar desa dan lebih berbaur langsung dengan masyarakat desa dan memiliki tugas tertentu sebagai pemerintah yang berada dan mengatur di Desa. Adapun definisi dari desa dalam hal ini yaitu suatu kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri didalamnya.

Dalam UU nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : Desa adalah desa yang bisa disebut dengan nama lain dari adat, kemudian yang dimaksud desa adalah sejumlah masyarakat yang memiliki hukum serta memiliki batas batasan wilayah yang berwenang dalam

---

<sup>3</sup> Kementerian Kesehatan RI, (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, Direktorat Penyebaran dan Pengendalian Penyakit.

mengatur, mengelola dan mengatur urusan pemerintah desa, kepentingan didalam masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak tradisional atau hak asal usul yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut diatas, telah jelas bahwa Pemerintah Desa mempunyai wewenang lebih luas dalam menjaga serta mengatur satuan wilayah kepemimpinannya, terutama masalah pandemi COVID-19 bagaimana strategi untuk menghadapi pandemi yang sedang berjalan. berdasarkan arahan dan himbauan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait penanganan kasus pandemi tersebut.

Setiap pemerintah desa memiliki cara dan strategi masing-masing dalam menanggulangi pandemi yang masih terjadi saat ini. Salah satunya pemerintah Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Beragam cara dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kasus pandemi ini. Salah satunya yaitu dengan mengadopsi inovasi dari kapolda jawa timur untuk menciptakan kampung tangguh semeru, hal ini dilakukan karena dianggap mampu dan efektif untuk mengurangi penyebaran virus corona dengan meningkatkan kegiatan gotong royong nasyarakat untuk menangkal dan memutus mata rantai virus COVID-19, yang didalamnya terdapat beberapa program seperti pemberlakuan *social distancing*, mewajibkan untuk pemakaian masker, dan menyalurkan bantuan pangan untuk masyarakat Desa Kertosari.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Pasal 1 Ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Menteri Hukum dan HAM, 2014), 2.

Untuk menjalankan program tersebut agar berjalan dengan lancar dan hasil bisa maksimal, tentunya membutuhkan strategi komunikasi yang cakap dan baik karena Komunikasi yang baik dan efektif itu mengenai bagaimana cara mengubah, bagaimana cara mengubah opini dan bagaimana mengubah perilaku masyarakat. Masyarakat desa misalnya tentang bagaimana cara menyadarkan masyarakat agar tetap berwaspada dan berhati-hati dalam berhubungan kontak langsung sosial. bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah desa ke masyarakat sehingga kedepannya tidak menimbulkan penambahan tingkat terinfeksi virus corona. Problematika tersebut tentunya membutuhkan perencanaan dan strategi komunikasi yang baik dan sangat matang agar dapat membentuk proses komunikasi yang efektif.

Komunikasi politik adalah komunikasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan perpolitikan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa dan melancarkan tindakan orang lain guna menjalankan kegiatan tertentu, baik pada tingkat hubungan suprastruktur maupun tingkat infrastruktur.<sup>5</sup>Tujuan disampaikannya pesan komunikasi adalah guna menyesuaikan semakin berkembangnya sistem informasi dan juga perubahan yang diinginkan didalam masyarakat. Secara sederhana komunikasi politik adalah segala penyampaian informasi pesan, yang berupa lambang atau berupa sebuah tulisan, ucapan lisan, berupa tanda-tanda untuk mempengaruhi posisi seseorang disituasi yang dikehendaki. Sedangkan komunikasi politik jika dilihat dari arti yang lebih luas

---

<sup>5</sup> Morissan dan Andy Corry Wardhany, Teori Komunikasi (Bogor: Ghaila Indonesia, 2009), p.1



adalah penyampaian pesan yang bermuatan informasi tentang dunia politik dari berbagai sumber yang disamakan kepada masyarakat.

Kampung Tangguh Semeru adalah program yang di inisiasi oleh Polisi Daerah (POLDA) Jawa Timur yang kemudian di adaptasi di tiap-tiap daerah untuk mengurangi penyebaran Pandemi COVID-19 di Wilayah Jawa Timur. Kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang menuntut warga untuk membiasakan yang tidak biasa menjadi biasa seperti pemeriksaan pemakaian masker apabila keluar masuk kampung, penyemperotan disinfektan kepada setiap kendaraan yang keluar masuk kampung, pembentukan ruang isolasi serta lumbung pangan dan antara ketua RW dengan Kepala Kelurahan terjadi komunikasi yang aktif, hal ini disebabkan apabila terdapat warga yang terindikasi COVID -19 maka Ketua RW yang bertugas juga sebagai Ketua Panitia dalam Kampung Tangguh Semeru didesa kertosari akan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Kelurahan setempat.<sup>6</sup>

Proses komunikasi yang dilakukan tidak lepas dari segala jenis rintangan serta hambatan. Maka dari itu, proses perencanaan sebuah komunikasi itu didesain seefektif mungkin agar dapat melewati rintangan dalam menjalankan komunikasi, komunikasi perencanaan dilihat dari sisi fungsi itu untuk menerapkan program yang akan dicapai, baik dalam hal penyampaian gagasan, pemasaran, maupun kerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

---

<sup>6</sup> Aprillia Findayani. "Upaya Pencegahan Covid-19 Sejumlah Desa di Kecamatan Toroh". (Pencegahan Covid-19),2020 1-8.

Komunikasi politik dapat dipahami menurut berbagai cara. McQuail, mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan semua proses penyampaian informasi termasuk fakta, pendapat- pendapat, keyakinan-keyakinan dan seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh para partisipan dalam konteks kegiatan politik yang lebih bersifat demikian melembaga<sup>7</sup>. Pandangan membersitkan beberapa hal penting komunikasi politik menandai keberadaan dan aktualisasi lembaga-lembaga politik, komunikasi politik merupakan fungsi dari sistem politik, dan komunikasi politik berlangsung dalam suatu sistem politik tertentu. Sejalan dengan McQuail, Meadow memberikan penegasan bahwa istilah komunikasi politik merujuk pada "*any exchange of symbols or messages that to significant extent have been shaped by, or have consequences for the functioning of political systems*" (segala bentuk pertukaran symbol atau pesan yang sampai tingkat tertentu dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya sistem politik). Definisi ini memberikan penekanan pada hubungan timbal-balik antara komunikasi dengan sistem politik.<sup>8</sup>

Komunikasi dipengaruhi dan mempengaruhi sistem politik. Dalam hal ini, Meadow menjelaskan sistem politik sebagai sistem-sisten yang memiliki komponen-komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain terkait dengan kekuasaan dan kewenangan penjatahan sumber daya untuk maksud pengambilan keputusan-keputusan.

---

<sup>7</sup> Hikmat, Mahi M. Komunikasi Politik: Teori dan Praktik (Dalam Pilkada Langsung). 2015 Bandung, Simbiosis Rekatama Media.

<sup>8</sup> Usman, "*Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*" 2015 Bandung, Simbiosis Rekatama Media.

Komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang di bahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sangsi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Rush dan Althoff mendefenisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian system politik ke bagian lainnya, dan diantara system social dengan system politik.<sup>9</sup>

Gabriel Almond berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap system politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan dan adjudikasi peraturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi system politik<sup>10</sup>.

Meriam Budiardjo memahami komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu meyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk di perjuangkan menjadi kebijakan politik. Sedangkan menurut Maswadi Rauf, mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas komunikasi dalam

---

<sup>9</sup> Nina Winangsih Syam, *Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi*. (Bandung: Unpad, 2002), 18

<sup>10</sup> Hikmat, Mahi M. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik (Dalam Pilkada Langsung)*. 2015 Bandung, Simbiosis Rekatama Media. Hal 55

kedudukan sebagai pekaku kegiatan politik. Komunikasi politik di bagi dalam dua dimensi yaitu kegiatan politik, penyampaian pesan-pesan yang bercirikan politik oleh aktor-aktor politik kepada pihak lain. Kedua, kegiatan ilmiah, kegiatan politik dalam sistem politik.<sup>11</sup>

Menurut Susanto, komunikasi politik adalah komunikasi politik yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang di bahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui sanksi yang di tentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Nimmo berpandangan bahwa komunikasi politik menggunakan politik hanya untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif, yang pengatur pembuatan keputusan mereka dalam konflik sosial.<sup>12</sup>

Menurut Mc. Quail dalam Swanson komunikasi politik adalah sebuah studi yang interdisipliner yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda dan konsep dalam membangun jati dirinya. Karena itulah komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang dikalaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik. Dan sering di kaitkan dengan komunikasi kampanye pemilu (*elections campaigning*), karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media masa sebagai alat kampanye<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Ibid Hal 48

<sup>12</sup> Ibid hal 57

<sup>13</sup> Alfian. 1991. Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Menurut Luciana Pye, antara komunikasi dan politik atau pemerintahan memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan (domain) politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Glanor misalnya mengatakan bahwa tanpa komunikasi tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik. Dalam pandangan Pye, bahwa tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (*enlarging*) dan melipatgandakan (*magnifying*) dan pilihan-pilihan individual, maka tidak akan ada namanya politik.<sup>14</sup>

Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo yang terletak di Kabupaten Mojokerto ini sudah melaksanakan program-program penanggulangan COVID-19 seperti kewajiban untuk memakai masker, vaksinasi, pembatasan sosial sampai pembuatan pos cek point keluar masuk dengan mudah untuk meminimalisir masyarakat. Pada masa pandemi Pemerintah Desa Kertosari ini tidak meluluh mengedepankan aspek kesehatan saja, aspek ekonomi dan politik juga tidak kalah pentingnya. Pemerintah desa juga mengedukasi kepada masyarakat, betapa pentingnya mengelola kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya serta menanamkan jiwa kewirausahaan. Dari segi politik pemerintah desa juga membangun rumah warga yang sangat kurang mampu dengan tujuan dapat mensejahterahkan warganya.

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian di aspek komunikasi politik untuk menanggulangi COVID-19. Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian, yang

---

<sup>14</sup> Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik di Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 25

diantaranya yaitu: pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas. Sedangkan yang kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.<sup>15</sup>

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. maka dengan hal ini peneliti mengangkat dengan judul “Komunikasi Politik Dalam Penerapan Kampung Tangguh Semeru Di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto”, dan akan di bahas lebih lanjut dalam penelitian di bawah ini.

---

<sup>15</sup> Sumarno, dimensi-dimensi komunikasi politik, 28.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana komunikasi politik dalam penerapan kampung tangguh semeru di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui komunikasi politik pemerintah desa dalam menerapkan kampung tangguh semeru di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupeten Mojokerto.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan riset penelitian ini ada beberapa manfaat yang diantaranya yaitu :

### 1. Akademisi

Dari penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu bahan rujukan dan juga pertimbangan untuk menambah wawasan, terutama untuk mereka yang sedang melakukan penelitian tentang strategi Pemerintah Desa dalam mengendalikan COVID-19.

### 2. Praktisi

Untuk menambah pengetahuan baru khususnya terhadap strategi pemerintah desa dalam mengendalikan pandemi COVID-19 ditingkatan

desa serta sebagai proses penerapan ilmu yang sudah diperoleh oleh peneliti selama duduk dibangku perkuliahan.

Manfaat praktis berikutnya sebagai pengetahuan baru kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kertosari mengenai strategi Pemerintahan Desa Kertosari dalam mengendalikan pandemi COVID-19 dengan menerapkan kampung tangguh semeru.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Komunikasi politik**

Komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang di bahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Rush dan Althoff (1997) mendefebisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian system politik ke bagian lainnya, dan diantara system social dengan system politik.<sup>16</sup>

Gabrel Almon berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap system politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi

---

<sup>16</sup> Rusadi Kantaprawira, Sistem Politik di Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1983), 25.



peraturan dan ajudikasi peraturan.<sup>17</sup> Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi system politik.

## 2. Pemerintah Desa

Menurut Kartohadikusumo, desa merupakan wilayah yang ditempat tinggal sejumlah masyarakat yang identik mempunyai rasa kepedulian tinggi seperti gotong royong, saling sapa menyapa, memiliki beragam adat istiadat serta memiliki panduan mandiri dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Secara etimologi kata Desa berasal dari kata *Deshi* yang berarti “tanah kelahiran” bisa juga disebut “tanah tumpah darah”. Jadi kata desa berasal dari kata *Deshi*, sedangkan jika dilihat pengertian secara umum desa dapat pula diartikan sebagai ruang lingkup wilayah paling kecil yang dapat dikelola pribadi oleh sejumlah kelompok masyarakat yang bertempat tinggal didalamnya dan menjalankan beberapa kebijakan yang sudah disepakati bersama agar dapat terciptanya kerukunan serta kesejahteraan masyarakat bersama.

Dalam sistem Pemerintah Republik Indonesia, Desa adalah garda terdepan yang memiliki keberadaan dan desa juga sebagai ujung tombak dari proses implementasi bentuk hidup yang demokratis. Peran masyarakat desa merupakan adalah pencerminan tentang sejauh mana regulasi mengenai demokrasi diimplementasikan ditingkat pemerintahan desa serta

---

<sup>17</sup> Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 9.

implementasian bentuk kehidupan yang demokratis terhadap setiap masyarakat. Sedangkan kata “Perintah”, yang memiliki arti sesuatu individu yang mempunyai tugas untuk pembuat perintah. Sedangkan definisi tentang pemerintahan merupakan lembaga dari perkumpulan sejumlah orang yang membuat peraturan serta mengatur masyarakat dengan memiliki cara serta strategi yang berbeda-beda dengan maksud untuk terciptanya kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat dan juga agar dapat terkonsep sempurna. Begitupula dengan keberadaan pemerintahan tingkat desa yang sudah dikenal sejak lama bahkan sebelum negara Indonesia mencapai kejayaan atau merdeka.

### 3. Penanggulangan COVID-19

Kasus COVID-19 pertama kali diumumkan pada akhir tahun 2019 tepatnya bulan Desember, sedangkan kasus COVID-19 masuk ke Indonesia sejak 2 Maret 2020. Tingkat penyebaran virus COVID-19 di Indonesia terjadi sangat cepat, bahkan bisa melalui udara atau barang.

Maka dari itu Indonesia harus mempunyai strategi yang cepat dan tepat dalam menanggulangi wabah virus tersebut baik ditingkatan lokal, nasional sampai provinsi, yang bertujuan untuk:<sup>18</sup>

- 1) Memperlambat dan menghentikan laju transmisi atau penularan, dan menunda penyebaran penularan.

---

<sup>18</sup> Supriyadi. Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Prespektif Hukum Profetik. Kebijakan Penanganan Covid-19, 2020. 91- 109.

- 2) Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis.
- 3) Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya.

Pandemi COVID-19 ini adalah bencana tidak wajar atau bisa dikatakan bencana non-medis, sehingga rencana tanggap COVID-19 bisa mengimplementasikan kerangka kerja tanggap bencana nasional dengan prinsip manajemen risiko pandemi. Data tentang respon tanggap COVID perlu ditinjau dan diperbarui setidaknya setiap 2 minggu. Konsep Aksi Tanggap Tanggap COVID-19 didasarkan pada Kerangka Kerja Bencana Nasional.<sup>19</sup>

#### 4. Kampung Tangguh Semeru

Bencana COVID-19 berpotensi eskalasi, sehingga seluruh elemen masyarakat, wilayah atau negara harus berjuang secara mandiri untuk melawan COVID-19, karena hampir semua wilayah dan negara yang berdampak dari virus corona. Karena semua orang terpengaruh dari dampak COVID-19, asumsi yang mendasarinya adalah bahwa daya dukung di luar sistem langkah atau kurangnya SDM pemerintah dan juga tim medis, sehingga masyarakat terkecil yairtu desa harus sangat adaptif atau tangguh untuk bertahan hidup. Ketidakpastian kapan pandemi akan

---

<sup>19</sup> Kementerian Kesehatan RI, "Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19," diakses 20 Maret 2021, <https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/kmk-no-hk-01-07-menkes-413-2020-ttg-pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19>.

berakhir mengharuskan kita membangun resistensi jangka panjang yang sistemik, berskala besar, dan efektif agar sumber daya pemerintah yang relatif terbatas tidak terkuras dalam jangka pendek, jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipilih. Oleh karena itu, Kapolda membuat inovasi kampung tangguh semeru, sehingga dalam hal ini perlu dibentuk cara pertempuran yang lebih sistematis, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan gotong royong masyarakat, meminimalkan satuan tugas yang sudah terbentuk. Ada pedoman di tingkat desa yang berlaku di tingkat kampung/RW/komunitas.<sup>20</sup> Kampung Tangguh Semeru merupakan program unggulan dari POLDA JATIM, sebagai langkah untuk melawan COVID-19 yang dilaksanakan mulai dari ruang lingkup terkecil, seperti desa masyarakat sekitar. Akhirnya Program ini diadopsi secara nasional yang dinamakan kampung tangguh nusantara, karena mampu berjalan efektif dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat untuk berjalan bersama dalam memutus mata rantai tingkat penyebaran Virus Corona.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>20</sup> Aurick Yudha Negara, dkk, *Pedoman Pengoperasian Kampung Tangguh (Langkah Sistematis Melawan Pandemi COVID-19)*, 2020, 23.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIK**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian perlu dibutuhkan yang namanya penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur peneliti untuk mengukur serta menganalisis suatu penelitian. Dari riset yang dilakukan oleh Gerry Wonok yang berjudul Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) yang dilakukan didaerah Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan memperoleh hasil bahwa proses menanggulangi virus corona baik dalam pencegahan penyebaran hingga dampak yang ditimbulkannya, pemerintah desa mendapatkan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat serta daerah seperti kami diwajibkan untuk membuat pos pengecekan orang masuk keluar desa, pembatasan ruang gerak terutama tamu dari luar desa, selain itu yang kami miliki adalah anggaran dana desa yang digeser sebagian untuk penanganan dampak COVID seperti BLT dan operasional penanganan penyebaran COVID.

Kekuatan desa yang terutama adalah masyarakatnya, dimana masyarakatnya kompak dan mendukung program pemerintah desa maupun pemerintah pusat. Partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19 sangat

vital, dimana mereka membuat kelompok-kelompok yang bertugas untuk menjaga pos perbatasan desa.<sup>21</sup>

Untuk selanjutnya hampir sama dengan hasil penelitian dari Gigih Arifani Setiawan yang berjudul Upaya Pemerintah Desa Desa Dalam Menanggulangi Penyebaran COVID-19 dan dilaksanakan Di Desa Bedadung Kabupaten Jember. Dari penelitian tersebut dapat diambil hasil bahwa, kebijakan dari pemerintah desa Bedadung dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ialah melalui kerjasama masyarakat, komunikasi dalam lingkungan serta didukung oleh pemerintah pusat atau daerah seperti halnya dengan menyesuaikan kekayaan desa melalui dana desa yang dikelola BLT dana desa serta pembelanjaan alat penunjang dalam melawan COVID. Kebijakan lain pemerintah desa yang mendukung seperti memanfaatkan potensi yang dimiliki pemerintah desa baik dari sisi staf yang terdiri dari kaur, carik, dan perangkat lainnya, informasi, kewenangan dan fasilitas. Sumberdaya tersebut dijadikan andalan pemerintah desa untuk mencegah penularan COVID-19 di Desa Bedadung. Langkah ini terbilang sudah cukup baik karena sampai saat ini masyarakat desa bedadung belum dinyatakan positif COVID.<sup>22</sup>

Adapun hasil penelitian dari Khaerati Risma tentang Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19 yang dilakukan di Kabupaten Gowa. Menyimpulkan bahwa ada empat indikator

---

<sup>21</sup> Gerry R.J. Wonok, "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan)," *Jurnal Politico*, 2020.

<sup>22</sup> Gigih Arifani Setiawan, "Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Penyebaran COVID-19 di Desa Bedadung Kabupaten Jember" (Skripsi, Jember, Universitas Muhammadiyah, 2021).

dalam menjalankan strategi komunikasi untuk menanggulangi virus corona di Kabupaten Gowa yaitu:

Pertama memahami khalayak, dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya kesehatan dengan mengarahkan masyarakat untuk lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mengurangi kegiatan yang berkerumunan. Kegiatan ini kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat dan juga stakeholder untuk dukung pemerintah Kabupaten Gowa memutus rantai terpapar Virus Corona, seperti Pemerinta Desa, Kecamatan, Karangtaruna, Polisi, Tokoh Masyarakat.<sup>23</sup>

Kedua penyusunan pesan, proses penyusunan pesan ini menggunakan cara pemaparan demham sedetail mungkin tentang tanda-tanda terdetek virus COVID-19, proses penanganannya, langkah untuk mencegah serta menyederhana istilah baru tentang menanggulagi Virus Corona. Agar dapat difahami dengan mudah dan diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Gowa. Selanjutnya pembagian masker gratis, vaksinasi gratis dan rapid tes secara gratis itu adalah program yang diterapkan di Kabupaten Gowa. Keempat penggunaan media dan seleksi, maksud media ini dengan melakukan bekerjasama seperti media internet maupun media cetak dan juga melalui website sosial milik desa. Bagi masarakat jika mempunyai kendala untuk menjangkau atau mengakses sumber informasi, bisa juga dilakukan penyuluhan secata langsung.

---

<sup>23</sup> Risma Khaerati, "Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19 Di Kabupaten Gowa", (Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2021)

Selanjutnya hasil penelitian dari penulis yang bernama Viktor Vengki Sipul dengan judul Strategi Pemerintah Desa Pendowoharjo Pada Masa Pandemi COVID-19 yang dilakukan didaerah Desa Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan selama pandemi adalah pembagian kartu keluarga sejahtera atau KKS untuk memerangi dampak virus corona dan kampanye ketahanan bahan pangan. Alokasi sembako sebagai bagian dari KKS dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diikuti oleh BNI Bantuan PKH. Sedangkan cara kampanye ketahanan pangan di desa Kapanewon Sewon Pendowoharjo Kabupaten Bantul yaitu:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana ketahanan pangan.
- 2) Mengembangkan cadangan pangan agar dapat didistribusikan ke setiap rumah warga.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat serta kesadaran dalam menambah cadangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat

Selanjutnya penelitian dari tentang Kebijakan Pemerintah Desa di Masa Pandemi COVID-19 di Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Virgilius Triyanto Agun menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Desa di masa Pandemi COVID-19 di Desa ini pemerintah menciptakan kebijakan dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 44 tahun 2020 mengenai penanggulangan virus corona, dan keputusan yang dibuat termasuk kebijakan yang dilakukan



sebagai pencegahan. Pengambilan kebijakan yang preventif ini dilakukan lewat tahapan formulasi, formulasi ini dilakukan melalui musyawarah desa khusus (MUSDESUS) dan melalui jalan lainnya dikaji untuk disesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat baik kebijakan social distancing dan physical distancing serta kebijakan Nomor 21 Tahun 2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Tahap adopsi kebijakan yang preventif Pemerintah Desa Pacarejo seperti dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, penutupan pasar, membeli kebutuhan pokok di warung lingkungan sekitar, wajib melaporkan tamu yang masuk ke desa, melakukan penutupan jalan dan meminta kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan serta takmir masjid untuk membantu mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya tahap implementasi kebijakan, implementasi kebijakan yang preventif dalam menghadapi COVID-19 sangat baik, karena melibatkan semua elemen masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang terdapat dalam desa. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Dalam tahap evaluasi, kebijakan preventif ini masih sangat minim dikarenakan pemerintah desa belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan preventif yang diambil. Pemerintah desa mengeluarkan kebijakan preventif, kebijakan ini sangat efektif untuk menghadapi virus corona, bisa dibuktikan hingga kini belum ada yang terpapar virus corona di Desa Pacarejo.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Virgilius Triyanto Agun, "Kebijakan Pemerintah Desa di Masa Pandemi COVID-19 Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul DIY Yogyakarta" (Skripsi, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pembangunan Desa "APMD," 2020).

Sedangkan menurut Sartika tentang Komunikasi Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Penanganan COVID-19 Di Desa Rappoala Kabupaten Gowa, memperoleh hasil bahwa dalam melakukan pengendalian virus corona dengan membangun komunikasi antara pemerintah Desa Rappoala dengan masyarakat. Masyarakat Desa Rappoala juga memberikan respon positif dan mendukung pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang diciptakan pemerintah. Mayoritas warga desa Rappoala kabupaten Gowa bersedia untuk mentaati arahan pemerintah. Dengan mematuhi prokes, masyarakat Desa Rappoala sangat memberikan respon yang baik dan berantusias tinggi terhadap adanya kegiatan bagi - bagi masker, pemberian handsanitizer, dan pemberian tempat cuci tangan. Sedangkan kendala yang terdapat pada komunikasi pemerintah dengan masyarakat di Desa Rappoala Kabupaten Gowa yaitu adanya masyarakat kurang memberikan respon yang baik terhadap partisipasi untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan alasan, banyak yang tidak mentaati peraturan pemerintah walaupun sudah diberikan arahan kepada mereka mengenai dampak dan akibat dari tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut.<sup>25</sup>

Selanjutnya penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang menjelaskan pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam dari Setiyana Norma. Yang melakukan penelitian di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung

---

<sup>25</sup> Sartika R, "Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Penanganan COVID-19 di Desa Rappoala Kabupaten Gowa" (Skripsi, Makassar, Universitas Muhammadiyah, 2021).

Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Menyimpulkan bahwasannya pemdes mempunyai peran penting, PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang telah diterapkan di Desa Jatibaru melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Selatan. Dalam perspektif hukum Islam langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh PEMDES Jatibaru telah dilaksanakan dengan apa yang diharapkan dan tidak kontra dengan ajaran Islam karena sudah melaksanakan peraturan pemerintah No. 20 tahun 2020 tentang PSBB. langkah tersebut diterapkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19.<sup>26</sup>

Adapun hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Atikah Nur Hidayati yang berjudul Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggapi Dampak COVID-19 di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang. Peneliti menyimpulkan bahwasannya, upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam menanggulangi COVID-19 di Desa Suka Jaya Kecamatan Sumedang Selatan sudah melaksanakan peraturan yang sudah disepakati oleh pemerintah pusat lewat surat edaran menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 8 Tahun 2020. Penerapannya dapat dibuktikan bahwa melaksanakan program-program yang sudah tertulis pada peraturan. Salah satu bentuk dan upaya dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Tanggapan dari masyarakat terhadap upaya yang dilakukan pemerintah desa sudah bisa digambarkan kalau

---

<sup>26</sup> Norma Setiyana, "Peran Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2021).

prilaku masyarakat tersebut bisa dikatakan posisi baik, meskipun masih ada beberapa masyarakat yang memberikan respon negatif tetapi hal ini tidak dijadikan masalah besar tapi dijadikan sebagai acuan untuk dilakukannya evaluasi dengan tujuan untuk dapat memberikan peningkatan terhadap pelayanan pemerintah desa. Dengan cara menerapkan kebijakan serta arahan dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, bisa dikatakan pemerintah desa berhasil menanggulangi COVID-19. Faktor yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam kesuksesan ini yakni mengenai kejelasan dan tujuan dari kebijakan tersebut serta sikap dari pelaksana sosial lingkungan dan politik ekonomi yang kondusif.<sup>27</sup>

Selanjutnya tentang optimalisasi peran desa dalam pencegahan COVID-19 di Desa Prangko'an Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Dimas Sasongko, menyimpulkan bahwa upaya menanggulangi virus corona yaitu dengan menjalankan berbagai bentuk kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan penyuluhan. Kegiatan tersebut memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh informasi dan data terhadap seluruh lapisan masyarakat tentang dampak dari virus COVID-19. Selain mengadakan sosialisasi mengenai bahaya dari penularan virus COVID-19, juga perlu yang namanya tindakan untuk mencegah yang salah satunya membuat desa tanggap COVID. Desa tanggap COVID ini dirasa mampu untuk lebih memperhatikan masyarakatnya

---

<sup>27</sup> Atikah Nur Hidayati, "Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggapi Dampak COVID-19 di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* Vol.13 No. 1 (2021).

baik dari sektor kesehatan maupun ekonomi dikarenakan kehilangan pekerjaan dari dampak adanya pandemi ini.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Farida Nurfalalah tentang Sosialisasi Strategi Komunikasi Layanan Aparatur Desa Pada Situasi Pandemi COVID-19 di Desa Argasunya Kota Cirebon. Menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi politik dalam menjalankan layanan aparatur desa itu menggunakan pelayanan dari rumah dengan menggunakan media seperti HP dengan mengakses layanan website yang sudah disediakan. Dan juga dalam penelitian ini disebutkan faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan layanan ini adalah jaringan internet yang tidak stabil atau hilang, kuota internet habis dan ada beberapa masyarakat yang masih gaptek, maka dengan ini ditakutkan apabila ada informasi mendadak sebagian masyarakat tidak bisa menjangkau.

Sedangkan untuk faktor penunjang dalam menjalankan layanan aparat desa dikelurahan aragsunya kota cirebon yaitu dari jumlah penduduk masing-masing RW masih bisa untuk dikendalikan seperti sosialisasi masyarakat yang dilakukan oleh RW dan RT. Dengan mengoprasikan teknologi komunikasi informasi ini bisa melaksanakan tugas dengan baik dan praktis terhadap publik.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut diatas dapat diperoleh hasil bahwa beberapa sudah menjalankan beberapa program yang bervariasi

---

<sup>28</sup> Farida Nurfalalah, "Sosialisasi Strategi Komunikasi Layanan Aparatur Desa Pada Situasi Pandemi COVID-19 di Desa Argasunya Kota Cirebon," *Jurnal UMT (Universitas Muhammadiyah Tangerang)* Vol. 2 (2020).

dengan tujuan untuk meminimalisir angka terjadinya penyebaran virus corona tersebut dengan baik dan mengikuti tata tertib yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari setiap masyarakat tentang dampak dan bahaya yang diakibatkan oleh virus corona.

Persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu terletak pada objek yang diteliti program pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, seperti bagi-bagi masker, handsanitaizer, membuat titik untuk bercuci tangan dan pembuatan pos poin keluar masuk desa agar tingkat penyebaran virus corona menurun. Walaupun ada beberapa kesamaan dalam penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini memiliki perbedaan yang lebih spesifik yakni pemerintah desa kertosari menerapkan program kampung tangguh semeru yang didalamnya tidak hanya mengatur kesehatan saja, tapi juga mengatur mulai dari segi sosial, politik dan juga ekonomi masyarakat Desa Kertosari selama masa pandemi COVID-19 berlangsung.

## **B. Kerangka Teori**

Komunikasi politik merupakan komunikasi yang memiliki tujuan dalam mencapai pengaruh massa yang luas, agar permasalahan yang dibahas oleh kegiatan komunikasi politik ini dapat mempengaruhi masyarakat dan membuat sanksi yang sudah dibuat oleh lembaga politik. dengan sanksi yang ditentukan lewat lembaga politik. Gabriel Almond mengemukakan bahwa komunikasi politik ini merupakan bagian dari fungsi pada lapisan sistem politik dan juga dianggap sebuah proses mengirim pesan politik yang berada pada enam fungsi

yaitu rekrutmen politik, sosialisasi politik, artikulasi kepentingan, membuat peraturan, agregasi kepentingan, menciptakan peraturan, ajudikasi peraturan dan penerapan peraturan. Maka dari itu fungsi komunikasi politik terjadi secara inheren disetiap fungsi sistem politik.

Komunikasi politik adalah komunikasi yang digunakan untuk menjalankan kegiatan perpolitikan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa dan melancarkan tindakan orang lain guna menjalankan kegiatan tertentu, baik pada tingkat hubungan suprastruktur maupun tingkat infrastruktur. Tujuan disampaikannya pesan komunikasi adalah guna menyesuaikan semakin berkembangnya sistem informasi dan juga perubahan yang diinginkan didalam masyarakat. Secara sederhana komunikasi politik adalah segala penyampaian informasi pesan, yang berupa lambang atau berupa sebuah tulisan, ucapan lisan, berupa tanda-tanda untuk mempengaruhi posisi seseorang disituasi yang dikehendaki. Sedangkan komunikasi politik jika dilihat dari arti yang lebih luas adalah penyampaian pesan yang bermuatan informasi tentang dunia politik dari berbagai sumber yang disampaikan kepada masyarakat.

Apabila definisi komunikasi dan definisi politik itu kita kaitkan dengan komunikasi politik, maka akan terdapat suatu rumusan sebagai berikut: Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.<sup>29</sup> Mengenai

---

<sup>29</sup> Astrid Soesanto. "komunikasi sosial diindonesia", bandung, 1983. Hal 25

komunikasi politik ini (*political communication*) Kanta prawira memfokuskan pada kegunaanya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah.<sup>30</sup>

Mendefinisikan komunikasi politik memang tidak cukup hanya dengan menggabungkan dua definisi, “komunikasi” dan “politik”. Ia memiliki konsep tersendiri, meskipun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. Komunikasi dan politik dalam wacana ilmu pengetahuan manusia merupakan dua wilayah pencarian yang masing-masing dapat dikatakan relatif berdiri sendiri. Namun keduanya memiliki kesamaan-kesamaan sebab memiliki objek material yang sama yaitu manusia. Kesamaan objek material ini membuat kedua disiplin ilmu itu tidak dapat menghindari adanya pertemuan bidang kajian. Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki sifat interdisipliner, yakni sifat yang memungkinkan setiap disiplin ilmu membuka isolasinya dan mengembangkan kajian kontekstualnya. Komunikasi mengembangkan bidangnya yang beririsan dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi dan psikologi, dan hal yang sama berlaku pula pada ilmu politik.<sup>31</sup>

Komunikasi politik secara keseluruhan tidak bisa dipahami tanpa menghubungkannya dengan dimensi-dimensi politik serta dengan segala aspek

---

<sup>30</sup> Rusadi kantrapwira, “sistem politik di Indonesia”. Bandung, sinar baru, 1983. Hal 25

<sup>31</sup> Nina winangsih, “rekonstruksi ilmu komunikasi perspektif pohon komunikasi. 2002. Bandung. Hal 18



dan problematikanya. Kesulitan dalam mendefinisikan komunikasi politik terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang terhadap kompleksitas realitas sehari-hari. Walaupun komunikasi dipahami secara sederhana sebagai “proses penyampaian pesan”, tetap saja akan muncul pertanyaan, apakah dengan demikian komunikasi politik berarti “proses penyampaian pesan-pesan politik.

Selain terdapat fungsi administratif pemerintahan, dalam sistem politik juga terjadi penggunaan kekuasaan dan perebutan sumber-sumber kekuasaan. Smith sendiri memahami kekuasaan sebagai pengaruh atas pembuatan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berlangsung secara terus menerus.

Adapun teori yang akan digunakan dalam menganalisa fenomena yang akan di teliti oleh peneliti adalah Teori Komunikasi Politik. Komunikasi politik merupakan penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat. Menurut Harold D. Lasswell ada beberapa unsur-unsur dalam proses komunikasi politik diantaranya:<sup>32</sup>

a. Komunikator

Seorang komunikator merupakan orang yang menyampaikan suatu pesan yang memuat pesan politik sehingga mencapai sebuah apa yang di harapkan. Peran komunikator dalam hal ini sangat strategis yang mampu membuat opini publik meskipun pesannya adalah proses negosiasi yang membangun sebuah konsensus di semua pihak-pihak yang

---

<sup>32</sup> Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi Politik* (Jakarta: Grasindo, 2004), 70.

berkaitan. Komunikator dalam hal ini bisa dilakukan oleh perseorangan atau dalam skala besar yang berkaitan dengan organisasi politik atau instansi pemerintahan.

Komunikator dalam proses Komunikasi politik memainkan peran sebagai pembentuk opini publik. Sedangkan pesan adalah pembicaraan-pembicaraan sebagai proses negosiasi yang bertujuan membentuk pengertian bersama antara berbagai pihak tentang bagaimana sikap seharusnya yang harus diperankan setiap pihak dan bagaimana bertindak terhadap sesamanya. Dari sini, isi komunikasi politik seharusnya tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan tetapi juga kemungkinan terjadinya konflik.

Hal itu mengandung pengertian bahwa pesan politik dimungkinkan mengandung paradoks sebagai bentuk penyelesaian konflik. Sedangkan media politik dalam proses komunikasi politik dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan juga mampu dimanfaatkan untuk berbicara kepada publik dengan sasaran tertentu. Menurut Novel Ali hal mendasar menjadi pembahasan dalam komunikasi politik adalah akibat yang ditimbulkan oleh komunikasi politik. Akibat tersebut dapat berbentuk simpati, partisipasi tetapi juga dapat berwujud sinisme, antipati serta perlawanan politik Dengan demikian komunikasi

politik harus mampu menghasilkan pembentukan dan perubahan sikap positif tetapi dapat juga bermakna negatif bagi komunikator politiknya.<sup>33</sup>

Sebagai opinion leader, komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Sosiolog Halloran, menempatkan komunikator politik dalam posisi utama dalam kegiatan komunikasi. Menurutnya proses komunikasi ditentukan oleh situasi sosial tempat dimana komunikasi bermula, berkembang dan berlangsung terus. Situasi ini mengharuskan keharmonisan hubungan antara komunikator dan komunikan dan menjadikan hubungan diantara keduanya sebagai bagian integral dari sistem sosial yang ada.

Selanjutnya, Harold Laswell mengidentifikasi terhadap tiga kelompok yang dapat berperan sebagai komunikator politik. Ketiga kelompok itu adalah politikus, profesional dan aktivis. Sebagai komunikator politik, politikus dapat berperan sebagai wakil dari suatu kelompok, dengan sendirinya pesan-pesan politikus diarahkan untuk mencapai tujuan politik dari suatu kelompok. Di samping itu politikus juga dapat berperan sebagai ideologi dalam kegiatan komunikasi politik. Sebagai komunikator politik yang berkecenderungan sebagai ideolog, politikus mengusahakan tercapainya kebijakan yang berdampak luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Indonesia Potret Manusia Indonesia* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999), 132

<sup>34</sup> Nimmo. "Komunikasi Politik Komunikator Pesan dan Media", 30-37

Komunikator profesional dapat berfungsi sebagai manipulator dan makelar simbol yang menghubungkan pemimpin satu sama lain dengan para pengikut. Sebagai makelar simbol, profesional bertugas untuk menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa yang lain yang berbeda tetapi dapat dimengerti. Komunikator politik dari unsur profesional terdiri atas jurnalis dan promotor. Yang termasuk dalam kategori promotor diantaranya adalah makelar-makelar simbol.

b. Pesan

Dalam proses ini komunikator melakukan pemberian sesuatu yaitu pesan yang dapat disampaikan dalam beberapa hal atau sesuatu, pesan tersebut dapat dikategorikan tertulis atau tersirat, verbal atau non verbal langsung atau tidak langsung pesan-pesan yang disampaikan mengandung unsur politik dengan beberapa pertimbangan yang ada untuk disampaikan kepada khalayak umum.

Pesan dalam kegiatan komunikasi politik diklasifikasikan Nimmo menjadi tiga hal. Pertama adalah pembicaraan tentang kekuasaan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain dengan janji dan ancaman. Pembicaraan kekuasaan adalah suatu usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan jalan menyampaikan pesan-pesan politik yang berisi janji-janji atau ancaman dalam suatu kegiatan komunikasi politik. Kedua, pembicaraan pengaruh. Pesan dalam komunikasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi khalayak dengan berbagai cara antara lain: nasehat, dorongan, permintaan, dan peringatan. Tujuan dari pembicaraan pengaruh

adalah berusaha memanipulasi persepsi atau pengharapan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Dan ke tiga, pembicaraan autoritas. Pesan dari pembicaraan autoritas adalah memberi perintah. Pembicaraan ini mengharuskan munculnya rasa kepatuhan khalayak kepada para pemimpinnya. Dengan demikian sumber-sumber autoritas sangat berbeda-beda apabila khalayak mempunyai kapabilitas yang tinggi maka pesan akan lebih mudah diterima apabila disampaikan oleh komunikator yang mempunyai latar belakang sosial yang sejenis.<sup>35</sup>

Pesan merupakan gagasan atau ide yang disampaikan komunikator kepada komunikan untuk tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan bisa berupa nasihat, perintah, permintaan yang disampaikan secara verbal ataupun non-verbal, terselubung atau bahkan terang-terangan, disadari atau pun tidak dan tentunya mengandung unsur politik. Sebagaimana dijelaskan dibagian komunikator politik, komunikator harus memerhatikan kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat yang akan dijadikan sebagai komunikan. Berhubungan dengan itu, relevansi pesan dengan keadaan komunikaan harus memerhatikan strategi penyampaian pesan politik baik dengan membuka forum interaksi, diskusi, terbuka atau

#### c. Saluran Media

Proses politik memerlukan saluran dan media komunikasi yang tepat. Saluran dan media komunikasi politik sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam proses serta aktivitas politik sekarang ini.

---

<sup>35</sup> Nimmo, "Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media". 75

Kebutuhan saluran dan media dalam proses politik adalah upaya yang serius agar pesan politik dapat menjadi konsumsi publik serta menjangkau khalayak luas.

Sekarang ini hampir tidak ada peristiwa politik yang tidak melibatkan media. Saluran politik sangat diperlukan dalam upaya ketersediaan keragaman aktivitas komunikasi politik agar sampai kepada masyarakat. Unsur ini adalah menyangkut dalam hal media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Tanpa adanya media yang disalurkan komunikasi tidak akan tercapai dengan maksimal, media yang digunakan tergantung dari para agen komunikator sehingga media yang digunakannya dapat efektif terhadap penyaluran pesan tersebut kepada penerima.

Komunikator mempunyai bentuk-bentuk simbolik dan kombinasinya dengan berbagai teknik dan media: secara lisan melalui perbincangan profesional, melalui catatan seperti media koran dan majalah, dan teknik elektronik seperti radio atau televisi. Dilihat secara luas, saluran komunikasi terdiri atas lambang-lambang, kombinasinya, dan berbagai teknik secara media yang digunakan untuk berbicara dengan khalayak. Dengan demikian maka saluran komunikasi adalah saran yang memudahkan penyampaian pesan. Maka saluran komunikasi lebih dari sekedar titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa berbicara kepada siapa, dalam keadaan bagaiman serta sejauh mana dapat dipercaya.

d. Penerima

Terkait dengan pesan yang disampaikan yang menyangkut menjadi sasaran dari pesan yang dari komunikator. Masyarakat merupakan bagian dari kelompok penerima pesan yang disalurkan oleh komunikator. Masyarakat menjadi target dari komunikator maka dari itu sangat penting pesan tersebut tersampaikan kepada masyarakat. Jalaluddin Rakhmat menjelaskan pengertian khalayak dengan sejumlah orang yang heterogen. Mereka menjadi khalayak komunikasi politik segera setelah mereka “mengkristal” menjadi opini publik.<sup>36</sup>

Arthur F. Bentley dalam bukunya *The Process of Government* sebagaimana dikutip Dan Nimmo memberikan pengertian yang mengarah pada pemahaman tentang khalayak sebagai bagian tertentu dari orang-orang dalam masyarakat yang diperlakukan tidak sebagai massa fisik yang terpisah dari masa yang lain, tetapi sebagai “kegiatan massa yang tidak menghalangi orang yang berpartisipasi di dalamnya untuk berpartisipasi juga dalam banyak kegiatan kelompok yang lain”.<sup>37</sup>

Khalayak dibagi atas khalayak yang terorganisir, tidak terorganisir dan khalayak umum (khalayak banyak) serta publik kepemimpinan. Khalayak terorganisasi terbagi dalam tiga kelompok, publik atentif, publik berpikiran isu dan publik ideologis. Publik atentif merupakan kumpulan warga negara yang dibedakan berdasarkan tingkatnya dalam keterlibatan

---

<sup>36</sup> Jalaluddin, “komunikasi politik hubungan antar khalayak dan efek.” Bandung, 2001. Hal 87

<sup>37</sup> Ibid. 42

politik, informasi, perhatian dan berpikiran kewarganegaraan. Publik atentif sering bermain sebagai pemuka pendapat, yakni orang-orang yang sering dimintai pendapatnya oleh warga negara lain yang kurang informasi dan kurang keterlibatannya dalam politik. Publik atentif menempati posisi penting dalam proses opini karena mereka bertindak sebagai saluran komunikasi interpersonal dalam aliran pesan timbal balik antara pemimpin politik dan publik umum. Publik atentif juga bergabung dengan pemimpin politik sebagai pembawa konsensus dan sebagai perantara antara khalayak umum dengan pimpinan politik.

e. Efek atau Perubahan

Efek dari komunikator adalah berhasil atau tidaknya proses komunikasi politik melalui pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator, jika pesan tersebut ada keberhasilan maka pesan tersebut dapat dikatakan berhasil jika tidak maka harus ada proses evaluasi dalam penyampaian pesan-pesan tersebut.

Komunikatif adalah nama lain dari penerima, penerima yang dimaksud adalah orang yang menerima pesan dari sumber. Komunikatif inilah yang akan mengartikan pesan verbal atau non-verbal tersebut berdasarkan pengalaman, rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir dan perasaannya.

Efek atau dampak merupakan suatu keniscayaan dalam komunikasi. Setiap proses komunikasi memiliki tujuan, begitu pula dengan komunikasi politik. Efektivitas komunikasi dinilai dari seberapa jauh kesamaan antara



komunikator dan komunikan, apakah sama pada tataran pengetahuan atau informasi, sikap, hingga tindakan atau perilaku. Hal inilah yang dikonsepsikan sebagai dampak komunikasi.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk memperoleh fenomena atau peristiwa sosial. Lexy J. Moleong mengungkapkan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata kata dan gambar.<sup>38</sup> Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas.

Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 11.

dusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar atau perilaku dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.<sup>39</sup> Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan.

Riset ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi dari pemerintah Desa Kertosari mengenai strategi komunikasi Pemerintah Desa dalam menanggulangi COVID-19 dengan menerapkan kampung tangguh semeru.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### 1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, dengan mengangkat judul komunikasi politik Pemerintah Desa Dalam Menerapkan Program Kampung Tangguh Semeru Didesa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

### 2) Waktu Penelitian

Penelitian ini berjalan langsung selama 2 bulan dimulai sejak awal bulan September 2022 sampai bulan akhir bulan Oktober 2022.

---

<sup>39</sup> Nugroho, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: CV. Sarnu Untung, 2003), 39.

### C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang atau responden yang mengerti dan memahami tentang situasi yang terjadi dan memberikan keterangan berupa informasi tentang fenomena yang terkait dengan penelitian ini. Penentuan subyek penelitian yaitu menggunakan purposive sampling untuk menentukan informan dengan pertimbangan dan penentuan secara matang, untuk memberikan data secara maksimal dan komprehensif.<sup>40</sup> Adapun subjek yang menjadi sasaran untuk pengamatan atau informan pada penelitian ini meliputi kriteria subjek penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Nama Informan Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	Tantoko Endro	Selaku Kepala Desa Kertosari
2.	Fathul Mubin	Sebagai Kepala Dusun Sidomulyo Desa Kertosari
3.	Susi Sulistyowati	Selaku KESRA Desa Kertosari
4.	Hari	Selaku SATGAS COVID-19 Desa Kertosari
5.	Komarudin	Masyarakat Desa Kertosari
6.	Wawan	Masyarakat dusun sidomulyo
7.	Muhammad andi	Ketua kepemudaan

<sup>40</sup> Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 28.

#### **D. Tahap-Tahap Penelitian**

Penelitian ini terdapat tiga tahapan yang wajib dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif yang diantaranya yaitu :

##### **1. Tahapan Pra Lapangan**

Menurut Moleong terdapat enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu difahami, yaitu etika penelitian lapangan yang diantaranya menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus surat perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih informan, menyiapkan perlengkapan penelitian.

Konsep rancangan yakni, melakukan konsultasi dan pengembangan ide lebih lanjut bersama Dosen pembimbing sekaligus Wali dosen, lalu selanjutnya pemilihan tempat yang dipilih yakni Desa Kertosari dikarenakan lokasi tersebut memiliki data yang dibutuhkan bagi peneliti, dan setelah pematangan konsep serta penentuan lokasi maka dilakukannya perizinan untuk melakukan riset sesuai dengan kebutuhan bagi peneliti.

##### **2. Tahap Lapangan**

Tahapan di mana periset telah mulai merambah serta menguasai latar riset dalam rangka pengumpulan data- data yang diperlukan terpaut dengan tema riset. Data yang dimaksud yakni bersumber dari warga atau masyarakat yang dirasa termasuk dalam kategori dan mampu memberikan data yang efisien bagi peneliti, tidak hanya masyarakat biasa namun

beserta tokoh masyarakat yang merupakan Ketua RT desa kertosari dengan maksud validasi data yang sebelumnya berasal dari masyarakat data yang diperoleh lebih benar adanya, data yang didapat juga bersumber dari instansi terkait yakni di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

### 3. Tahap Analisis Informasi

Tahap ini merupakan tahap di mana Peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari Informan maupun dokumen-dokumen pada tahap sebelumnya. Tahap ini diperlukan sebelum Peneliti menulis laporan penelitian. Dalam sesi analisis informasi untuk melaksanakan uji kredibilitas informasi dengan metode triangulasi informasi yang diperbandingkan dengan teori kepustakaan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Dalam poses pengumpulan data observasi digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial politik yang sedang terjadi Didesa Kertosari secara istematis dari beberapa gejala yang muncul di objek pada penelitian seperti pasian yang mengalami paparan virus covid 19, ekonomi yang menurun. Dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomenana apasaja yang sudah diperoleh dari masyarakat desa kertosari seperti bentuk aktivitas yang terjadi, dan apa respon dari pemerintah desa

dari kejadian tersebut jika ditinjau dari sudut pandang mereka mengenai kejadian yang sudah diamati.<sup>41</sup>

Observasi juga dijadikan sebuah proses untuk melakukan penyelidikan secara sistematis serta dilakukan dengan menggunakan panca indra pengelihat terhadap fenomena yang berlangsung di lapangan dan dianalisis di waktu kejadian tersebut berlangsung. Metode observasi ini lebih objektif, tujuan utama dari observasi adalah untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Kualitas tingkat baik buruknya sebuah penelitian itu ditentukan seberapa jauh dan seberapa mendalam peneliti memahami terkait situasi dengan menggambarkan seefektif mungkin.

## 2. Wawancara

Dalam melakukan penelitian metode wawancara ini sebagai teknik pengumpulan data percakapan yang dimaksud untuk menggali informasi dari informan. Teknik wawancara di sini dilakukan secara akrab dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga informan juga lebih leluasa untuk memberikan informasi-informasi penting yang nanti digunakan bagi peneliti.

Wawancara ini menggunakan model wawancara semi struktural, yang dimana dalam wawancara ini bertujuan untuk mencari sebuah jawaban hipotesis mulai dari pemerintah desa sampai masyarakat desa kertosari. Yang nanti akan dipergunakan untuk sampel penelitian dengan

---

<sup>41</sup> Afifuddin, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 134.

menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan kepada informan, keuntungan dari menggunakan wawancara model struktur ini yaitu tidak perlu melakukan pendalaman pertanyaan yang dirasa nanti muncul yang namanya dusta dari informan yang nanti kita wawancarai masyarakat maupun dari pemerintah desa kertosari.

### 3. Dokumentasi

Dalam memperoleh informasi peneliti juga bisa mengumpulkan sumber-sumber fakta yang telah tersimpan berupa arsip foto, catatan harian jurnal hasil kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi menurut Sugiono adalah metode atau teknik pengumpulan data sumberdokumen yang bersifat fakta seperti sejarah kehidupan, peraturan kebijakan, biografi, dan catatan dari peristiwa yang sudah terjadi dalam sebuah bentuk tulisan dan lain-lain.<sup>42</sup>

Oleh karena demikian, dokumentasi adalah teknik pendukung atau pelengkap dari adanya teknik wawancara dan observasi. Peneliti akan mengambil dokumentasi pada saat dilakukan wawancara dengan Kepala Desa Kertosari beserta tokoh masyarakat sampai dengan masyarakat yang merasakan langsung terhadap dampak strategi yang telah dijalankan oleh Pemerintah Desa Kertosari tersebut.

---

<sup>42</sup> S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 113.



## F. Teknik Analisis Data

Setiap penelitian pasti perlu adanya teknik untuk menganalisis data sebagai proses untuk mengolah data yang terkumpul. Maksudnya sebagai proses untuk penyusunan urutan data serta mengelompokkan kedalam unit deskripsi, melihat keterkaitan, membuat perbandingan serta kesamaan dan perbedaan data yang siap untuk dipelajari. Tylor menjelaskan secara spesifik mengenai analisis data merupakan sebuah proses formal yang dilakukan untuk mengajukan hipotesis dan memperoleh tema.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik kualitatif, karena data penelitian yang diangkat dari lapangan juga memiliki sifat-sifat kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, terdapat beberapa hal dalam melakukan analisis data, antara lain yakni :<sup>44</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhana dengan melakukan seleksi, pemfokusan data dan keabsahan data mentah yang akhirnya menjadi sumber informasi yang memiliki makna sehingga dapat mempermudah proses penyajian data.

### 2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data langkah berikutnya yaitu melakukan penyajian data. Penyajian data ini adalah proses mengumpulkan pesan atau informasi yang sudah diatur dalam kategori atau kualifikasi dari data tersebut. Dalam

---

<sup>43</sup> Afifuddin, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, 145.

<sup>44</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 210.

menampilkan data penelitian kualitatif bisa berbentuk diagram, pemaparan sederhana, hubungan antar kategori, diagram alir dan lain sebagainya.

### 3. Penarikan kesimpulan

Pengumpulan makna dari hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk paragraf pendek, jelas serta mudah untuk difahami. Maka dari itu harus dilakukan mereview ulang agar tingkat penarikan kesimpulan relevan dan konsistensi dengan judul, tujuan serta rumusan masalah.

## G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian harus mempunyai kevalidan data, kevalidan data itu bisa dinyatakan akan keabsahannya itu harus melalui uji penelitian dengan menggunakan uji keabsahan data. Dengan menggunakan pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, memperpanjang dalam pengamatan, membercek serta analisis kasus. Setelah itu bisa untuk dilakukan audit dari awal sampai akhir dengan maksud untuk memperoleh data yang benar-bener valid.

Tiap riset wajib mempunyai informasi yang valid, dimana kevalidan dalam riset bisa dinyatakan keabsahannya lewat suatu uji. Uji dalam riset ini memakai tahapan uji keabsahan informasi. Ialah dengan memakai uji kredibilitas informasi. Uji kredibilitas data dicoba dengan tata cara penambahan atau memperpanjang waktu riset, diskusi dengan teman, analisis kasus yang negative dan member-check atau validasi ulang data yang didapatkan dari wawancara perorangan. Setelah itu dapat dilakukan

pengecekan data dari awal mula hingga akhir dengan tujuan data atau informasi yang didapatkan betul-betul informasi yang real dan valid. Masing- masing data yang valid hendak menjadikan data reliabel.



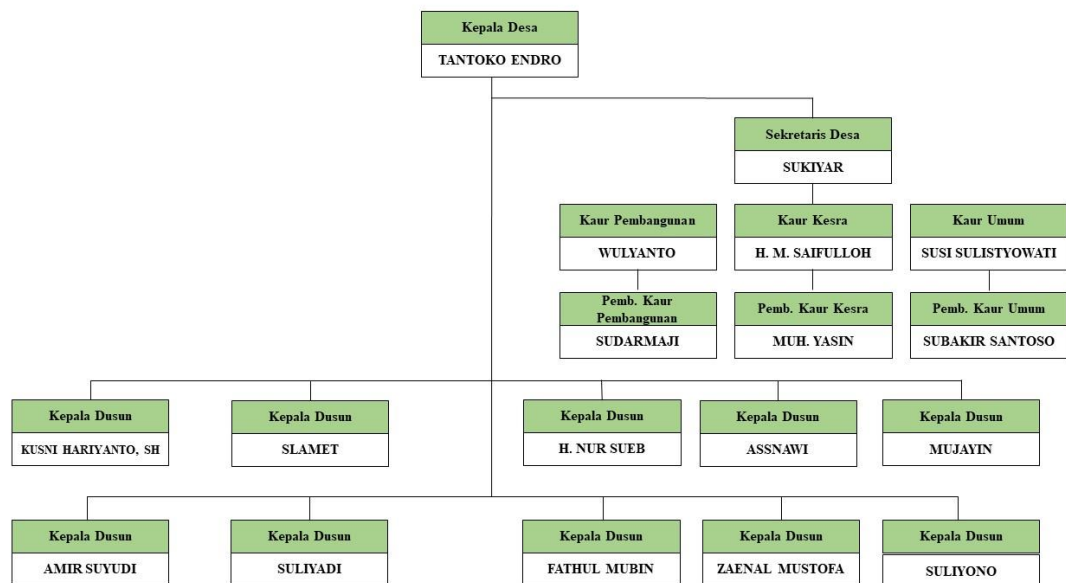
UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB VI PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

### A. Deskripsi Penelitian

Desa Kertosari adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Desa Kertosari memiliki struktur organisasi Desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Tantoko Endro. Berikut susunan struktur organisasi perangkat Desa Kertosari:<sup>45</sup>

Bagan 4.1  
Struktur Perangkat Desa Kertosari



Desa Kertosari memiliki luas wilayah 315,41 Ha. Yang lebih dispesifikasikan sebagai berikut : luas tanah sawah 180,20 Ha, luas tanah kering 48,29 Ha, luas tanah perkebunan 29,01 Ha, luas fasilitas umum 57,91 Ha. Dengan batas desa sebagai berikut:

<sup>45</sup> Dokumen Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Tabel 4.1  
Batas Wilayah Desa Kertosari

No.	Batas	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Kutorejo, Windurejo	Kutorejo
2.	Sebelah Selatan	Simbaringin	Kutorejo
3.	Sebelah Timur	Sampangagung	Kutorejo
4.	Sebelah Barat	Kepuh Arum	Kutorejo

Desa Kertosari memiliki jumlah Kepala Keluarga 844 dan kepadatan penduduk 1.315,66 per KM. Berikut akan dijelaskan dalam bentuk tabel di bawah ini:<sup>46</sup>

Tabel 4.2  
Tabel Penduduk Desa Kertosari

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1611 orang
2.	Perempuan	1540 orang
<b>Total</b>		<b>3151 Orang</b>

Dari tabel tersebut telah dihitung jumlah penduduk Desa Kertosari sejumlah 3151 orang. Dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1611 orang dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1540 orang.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Dokumen Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

<sup>47</sup> Dokumen Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

Adapun data tingkat pendidikan oleh penduduk Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto akan dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3  
Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Pendidikan			Jumlah
	Sedang ditempuh	Tamat	Tidak tamat	
1.	TK			114 orang
2.	SD			5 orang
3.		SD		513 orang
4.			SD	996 orang
5.	SLTP			156 orang
6.		SLTP		381 orang
7.			SLTP	74 orang
8.	D1			311 orang
9.		D1		6 orang
10.		D2		8 orang
11.		D3		3 orang
12.	S1			18 orang
13.		S1		57 orang
14.	S2			2 orang
15.		S3		1 orang

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang lulus pendidikan dibangku sekolah dasar sangat sedikit yaitu 513 sedangkan yang tidak lulus atau putus ditengah jalan hampir dua kali lipatnya yang

berjumlah 996. Sedang yang lulus pendidikan dibangku perkuliahan berjumlah 58 yang diantaranya 57 untuk S1 dan S3 berjumlah 1 orang.<sup>48</sup>

Adapun data mata pencaharian penduduk Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, yaitu:

Tabel 4.4  
Mata Pencaharian Pokok

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Buruh Tani	243 orang	239 orang
2	Petani	179 orang	177 orang
3	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	11 orang	15 orang
4	Pengerajin	33 orang	18 orang
5	Peternak	105 orang	102 orang
6	Montir	7 orang	0 orang
7	TNI	8 orang	0 orang
8	POLRI	1 orang	0 orang
9	Pedagang Keliling	14 orang	13 orang
10	Pembantu Rumah Tangga	0 orang	12 orang
11	Karyawan Perusahaan	1 orang	0 orang
12	Pensiunan/Purnawirawan	4 orang	1 orang
<b>Total Jumlah Penduduk</b>		<b>1.183</b>	

Berdasarkan pemaparan data dalam tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Kertosari adalah sebagai

<sup>48</sup> Dokumen Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto

buruh tani dengan data berjumlah 482 orang. Sedangkan penduduk yang bermata pencaharian sebagai peternak berjumlah 207 orang. Dan penduduk yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 26 orang.

Adapun data agama atau keyakinan yang dianut oleh penduduk Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	1611 orang	1540 orang
2.	Kristen	-	-
3.	Budha	-	-
4.	Hindu	-	-
5.	Lain-lain	-	-
<b>Total</b>		<b>3151 Orang</b>	

Berdasarkan pemaparan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Kertosari secara keseluruhan memeluk agama Islam. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3.151 orang. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1611 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1540 orang.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Dokumen Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto



## B. Kondisi Ekonomi Dan Politik Pada Masa Pandemi

Pandemi global telah membawa banyak perubahan di beberapa sektor yang menghambat arus perekonomian masyarakat yang berimbas pada pedagang kecil sampai menengah dan juga berdampak pada sektor politik. Yang akan dipaparkan lebih detail di bawah ini :

### 1. Kondisi Ekonomi

Pada waktu pandemi ekonomi masyarakat desa Kertosari mengalami penurunan mulai dari karyawan swasta yang diliburkan dan juga berdampak pada beberapa pengusaha rumahan atau *home industri* yang mengalami kesulitan untuk mengirim barang karena ada beberapa akses jalan yang ditutup.

Maka dari itu pemerintah Desa Kertosari melakukan komunikasi politik terhadap semua kadus yang berjumlah 10 Dusun, dengan mendata nama kepala keluarga yang kurang mampu. Yang bertujuan dapat membawa perubahan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik terutama di dalam bidang ekonomi masyarakat yang terdampak. Peneliti mengajak diskusi bersama kepala dusun Wonokerto menyatakan bahwa :

“Kami jajaran kepala dusun desa Kertosari melakukan terhadap komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bantuan ketahanan pangan yang berupa sembako yang diberikan pada setiap 1 kepala keluarga yang kurang mampu”<sup>50</sup> – bapak Suliyadi

---

<sup>50</sup> Wawancara, kepala dusun Wonokerto, Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. 2022.

Dengan memberikan 1 paket sembako yang diberikan terdiri dari 5 Kg beras, 1 liter minyak goreng, telur 6 butir, 1 gula, 5 bungkus mie instan yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat yang terdampak secara ekonomi khususnya mereka yang kehilangan penghasilan akibat pandemi ini. Dengan diterapkannya kampung tangguh semeru sesuai dengan arti semeru sendiri yakni sehat, aman, tertib, dan rukun diharapkan kedepannya serta dapat membawa masyarakat kearah kehidupan yang sejahterah.

## 2. Kondisi Politik

Adanya perlibatan komunikasi politik pemerintah desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi politik pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis merupakan syarat penting pembentukan proses kepemimpinan dalam sebuah daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat desa kertosari, dapat diketahui bahwa Pandemi covid-19 tidak mempengaruhi proses partisipasi politik masyarakat, justru sebaliknya pandemi covid-19 dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam hal ini pemerintah dan partai politik untuk mensosialisasikan segala aktivitas politik dengan penuh ketaatan dan kesadaran dalam melaksanakan kegiatan kampanye dan pemilu dengan menggunakan protokol kesehatan dan media-media lain sehingga kegiatan kampanye dan pemilu dapat berjalan dengan baik. Masyarakat desa kertosari berpendapat bahwa :

“Pada pemilihan daerah kemarin saya tidak terganggu atau pandemi covid-19 tidak menyurutkan saya untuk berpartisipasi politik, karena

hak pilihan saya dapat mempengaruhi kondisi sosial politik yang akan mendatang”<sup>51</sup> – bapak lukman

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya untuk partisipasi politik masyarakat tetap berjalan efektif, karena masyarakat Desa Kertosari sadar akan politik bahwasannya, partisipasi politik merupakan bentuk kewajiban warga negara di dalam negara demokrasi, termasuk juga partisipasi politik masyarakat Di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

### **C. Data dan Analisis Komunikasi Politik Pemerintah Desa dalam Menerapkan Kampung Tangguh Semeru**

Pada tahapan ini komunikasi politik pemerintah desa dalam menerapkan kampung tangguh semeru menjadi pokok pembahasan yang fundamental dan tentunya program kampung tangguh semeru ini yang dibuat oleh kapolda jatim ini akan terlihat berhasil atau tidaknya jika sudah memenuhi beberapa point penting yang seperti yang telah dikemukakan oleh Harold D. Lassweel ada beberapa unsur-unsur dalam proses komunikasi politik diantaranya, komunikator politik, pesan politik, media saluran, penerima atau sasaran, dampak atau efek. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Kampung Tangguh Semeru**

Bupati Mojokerto mengeluarkan surat edaran nomor 29 tahun 2021 tentang pengetatan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Sisease*

---

<sup>51</sup> Wawancara, masyarakat desa kertosari kecamatan kutorejo. 2022

(COVID-19) di Kabupaten Mojokerto. Yang berisi tentang meningkatkan protokol kesehatan menggunakan masker serta mencuci tangan menggunakan sabun, mengoptimalkan peran satuan tugas COVID-19 tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa, dan mengoptimalkan kembali kampung tangguh dimasing-masing desa.<sup>52</sup>

COVID-19 akhirnya menaklukkan hampir di seluruh negara di dunia. Tidak dapat dipastikan kapan pandemi ini berakhir. Sehingga, menimbulkan kekhawatiran masyarakat akibat dari situasi ini. Di samping itu, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dalam menanggulangi bencana wabah COVID-19. Seperti diketahui bersama bahwa dampak COVID-19 mempengaruhi hingga ketinggian desa baik kesehatan, ekonomi, social, politik dan budaya yang terus terganggu. Oleh karena itu pemerintah desa dalam menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 menjadi sangat penting. Dalam Kebijakan di Desa Kertosari mempunyai kebijakan yang di implementasikan oleh pemerintah Desa dengan cara menjalankan program kampung tangguh semeru, dalam program ini terdapat point penting

Surat edaran Pemerintah Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19, menuntut desa agar membentuk relawan lawan COVID-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang

---

<sup>52</sup> Surat edaran , tentang pengetatan protokol kesehatan. No 29 tahun 2021

(puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya).<sup>53</sup> setiap dusun di pasang poster yang bertuliskan “tamu dari luar desa atau luar kota wajib lapor”, dalam tujuan poster tersebut adalah setiap tamu atau warga yang dari luar desa maupun dari luar kota yang hendak datang ke Desa Kertosari diwajibkan lapor karena warga Desa Kertosari ada beberapa yang bekerja di luar kota. Setelah itu juga membuat pos-pos di setiap jalan keluar dan masuk Desa Kertosari yang digunakan untuk mengontrol warga yang hendak keluar dan masuk ke Desa Kertosari dengan melalui pengecekan suhu tubuh, pemeriksaan identitas, memperketat penerapan 3M (mencuci tangan, memakai masker, memakai *handsanitizer*) dan mensterilkan warga yang hendak masuk ke Desa Kertosari.

Berdasarkan surat edaran Pemerintah Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19, warga desa harus menjaga jarak atau *sosial distancing*, menyediakan tempat cuci tangan di beberapa titik, Pembagian masker se cara gratis juga merupakan langkah yang dipilih oleh Pemerintah Desa Kertosari dan para relawan karena banyak masyarakat desa yang belum mempunyai masker, penyemprotan keliling disinfektan bahan yang digunakan dalam pembuatan disinfektan sudah dipersiapkan dan diracik oleh Desa sendiri , saat penyemprotan terutama di tempat-tempat umum seperti Kantor Desa, tempat ibadah dan di setiap rumah warga dilakukan setiap hari Jum’at. Pemerintah Desa selalu

---

<sup>53</sup> Surat Edaran, Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Nomor 5 Tahun 2020

berupaya bagaimana agar Desa Kertosari selalu aman dari COVID-19 dan bersinergi dengan relawan COVID-19, relawan desa merupakan bagian dari pemerintah desa ditambah pendamping yang ada di desa, tokoh masyarakat, dan karang taruna.

Disamping itu, pada bulan Maret 2020, kasus virus COVID-19 di Indonesia pun telah terdeteksi. Jumlah kasus positif pun semakin hari kian bertambah. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penambahan kasus COVID-19 masih terus meningkat di bulan Januari 2021. Hal ini tentu meresahkan masyarakat.<sup>54</sup>

Artinya pemerintah belum sigap dalam menanggulangi permasalahan. Masalah paling utama dari komunikasi pemerintah menangani bencana COVID-19 yaitu kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan, minimnya sosialisasi informasi terkait beberapa isu, kurang akuratnya data dan informasi, dan rendahnya kepercayaan publik. Dan salah satu kasus dari permasalahan kurangnya efektifitas komunikasi ini diantaranya yaitu tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah Komunikasi Politik yang digunakan oleh kepala daerah dengan masyarakat menjadi salah satu komponen yang penting sehingga mampu memastikan keberhasilan program pencegahan penyebaran COVID-19.

Sesuai dengan penegasan dari Presiden Joko Widodo bahwasanya pemerintah daerah seharusnya tidak boleh menerapkan kebijakan secara

---

<sup>54</sup> Juaningsih, "Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia" Bandung. 2020.

masing-masing yang tidak selaras dengan protokol kesehatan. Pihak swasta serta Pemerintah daerah harus patuh pada kebijakan PSBB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Adapun bentuk kegiatan yang diterapkan dalam kampung tangguh semeru ini diantaranya adalah :

a. Pembagian masker

Mengingat virus COVID ini sangat begitu cepat menyebar melalui saluran pernapasan, kegiatan bagi-bagi masker lebih utama untuk ditekankan kepada masyarakat wajib pakai masker mulai dari kalangan muda sampai pada tua.

b. Membuat beberapa titik cuci tangan

Tujuan dibuatnya tempat cuci tangan agar masyarakat selalu menjaga kebersihan sehingga dapat meminimalisir penyebaran virus COVID 19 baik bagi dirinya sendiri maupun lingkaran keluarga dan untuk pemerintah desa kertosari ini sudah membuat 17 tempat cuci tangan yang disebar di beberapa lokasi yang berbeda.

c. Penyemprotan

Dalam menjalankan kegiatan penyemprotan disinfektan ini masyarakat dilibatkan secara bergilir dengan dibawa komando tim Satgas COVID Desa. Dalam hal ini pemerintah desa memperoleh bantuan disinfektan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto sehingga pemerintah desa tidak bersusah payah untuk mencari maupun meracik sendiri.

d. Sosialisasi dampak dari COVID

Pada kegiatan ini agen komunikasi politik memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan juga penanganan, aktor komunikasi politik ini juga melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang menjadi pasien dalam pengawasan atau Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan melapor kepada kepala satgas agar segera mendapat perawatan khusus ketika ada masyarakat terindikasi positif COVID-19.

e. Membuat pos cek point

Pada kegiatan ini bertujuan untuk pembatasan dan pencatatan orang maupun kendaraan yang keluar masuk, menentukan jadwal agenda kepada masyarakat untuk menjaga dipos tersebut, dan mengawasi setiap masyarakat agar melakukan isolasi mandiri serta tidak keluar rumah kecuali untuk keperluan kesehatan.

f. Membuat gudang logistik

Fungsi dari dibentuknya gudang logistik agar dapat memenuhi kebutuhan makanan kepada masyarakat yang menjadi pasien Orang Dalam Pengawasan (ODP), agar tetap terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan juga memastikan bantuan ini sampai pada penerima.

2. Pemerintah Desa

Menurut Kartohadikusumo, desa merupakan wilayah yang ditempat tinggali sejumlah masyarakat yang identik mempunyai rasa kepedulian tinggi seperti gotong royong, saling sapa menyapa, memiliki beragam adat



istiadat serta memiliki panduan mandiri dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Secara etimologi kata Desa berasal dari kata *Deshi* yang berarti “tanah kelahiran” bisa juga disebut “tanah tumpah darah”. Jadi kata Desa berasal dari kata *Deshi*, sedangkan jika dilihat pengertian secara umum desa dapat pula diartikan sebagai ruang lingkup wilayah paling kecil yang dapat dikelola pribadi oleh sejumlah kelompok masyarakat yang bertempat tinggal didalamnya dan menjalankan beberapa kebijakan yang sudah disepakati bersama agar dapat terciptanya kerukunan serta kesejahteraan masyarakat bersama<sup>55</sup>.

Dalam sistem Pemerintah Republik Indonesia, Desa adalah garda terdepan yang memiliki keberadaan dan desa juga sebagai ujung tombak dari proses implementasi bentuk hidup yang demokratis. Peran masyarakat desa merupakan adalah pencerminan tentang sejauh mana regulasi mengenai demokrasi diimplementasikan ditingkat pemerintahan desa serta implementasian bentuk kehidupan yang demokratis terhadap setiap masyarakat. Sedangkan kata “Perintah”, yang memiliki arti sesuatu individu yang mempunyai tugas untuk pembuat perintah. Sedangkan Definisi tentang pemerintahan merupakan lembaga dari perkumpulan sejumlah orang yang membuat peraturan serta mengatur masyarakat dengan memiliki cara serta strategi yang berbeda-beda dengan maksud untuk terciptanya kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat dan juga agar

---

<sup>55</sup> Kartohadikusumo, peran dan fungsi pemerintah desa dalam membangun masyarakat demokratis. Tahun 2017.hal. 72

dapat terkonsep sempurna. Begitupula dengan keberadaan pemerintahan tingkat desa yang sudah dikenal sejak lama bahkan sebelum negara Indonesia mencapai kejayaan atau merdeka

Pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Karena itu, peranan mereka demikian penting dan banyak menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>56</sup>

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Pasal 1 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 ).  
Pemerintahan Desa terdiri atas: Pemerintah Desa dan Badan

---

<sup>56</sup> Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020

Permasyarakatan Desa (BPD). Pemerintah Desa sendiri adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>57</sup>

Dengan kata lain, Pemerintahan Desa merupakan lembaga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan daerah yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan di desa yang nantinya akan berdampak dalam perkembangan pembangunan dan kepentingan nasional.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil dan kekayaannya menjadi kekayaan daerah

---

<sup>57</sup> Undang-undang (UU), tentang Pemerintahan Desa No. 6 Tahun 2014

dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.<sup>58</sup>

Menurut Julianta adalah pengertian Desa dilihat dari segi sosial budaya itu bisa dikatakan sebuah komunitas yang berada dalam kesatuan geografis serta saling menyapa, mengenal, dan saling bertoleransi dengan baik ditandai bentuk kehidupan relative homogen dan kehidupannya lebih banyak bergantung terhadap sumber kekayaan yang berada dialam. Maka sebab itu desa diartikan sebagai masyarakat yang menjalani hidup dalam kesederhanaan seperti ditingkat sektor agraris, tingkat berpendidikan yang rendah, tingkat jiwa sosialis tinggi, adat istiadat dan tradisi yang kental.

Dalam sistem Pemerintahan Indonesia, Pemerintah Desa dikenal sebagai bentuk tata kelola pemerintahan paling bawah dari tata pemerintahan Indonesia. Desa juga bisa dikatakan sebagai ujung tombak dari pemerintahan serta didesain dalam peraturan perundang undangan. Maka dari itu tidak sedikit para ahli yang mengemukakan pendapat tentang pengertian desa seperti menurut Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa pemerintah desa itu bagian bentuk yang dilanjutkan dari penduduk sampai lenbaga wilayah mereka huni, yakni diladang yang tersebar dimana mana dan bagian desa yang dijadikan sebagai segala jenis aktivitas bersama yang saling berinteraksi sosial, gotong royong, tukar menukar

---

<sup>58</sup> Sri Ulina, "Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Perspektif* Vol. 4 No.2 (Juli 2016): 8.

jasa, ikut serta untuk beraktivitas sosial yang berjalan didalam masyarakat desa.

### 3. Komunikator

Seorang komunikator merupakan orang yang menyampaikan suatu pesan yang memuat pesan politik sehingga mencapai sebuah apa yang di harapkan. Peran komunikator dalam hal ini sangat strategis yang mampu membuat opini publik meskipun pesannya adalah proses negosiasi yang membangun sebuah konsesus di semua pihak-pihak yang berkaitan. Komunikator dalam hal ini adalah pemerintah desa karena perangkat pemerintah desa mempunyai peran tertinggi dalam mengatur masyarakat untuk bergerak bersama-sama untuk mengatasi problematika yang sedang terjadi didalam desa tersebut.

Komunikator politik merupakan bagian integral dalam berlangsungnya proses komunikasi. Komunikator politik yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi, yaitu komunikator yang menduduki struktur kekuasaan, karena merekalah yang mengelola, mengendalikan lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi dan mereka yang menentukan kebijaksanaan nasional.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Zaenal Mukarom, "Komunikasi Politik" Pustaka Setia, Bandung. 2016

Karena itu sebagai komunikator politik diuntut berbagai persyaratan agar proses komunikasi mencapai sasaran sebagaimana diharapkan. Persyaratan persyaratan yang dimaksud yaitu :<sup>60</sup>

1. Memiliki nuansa yang luas tentang berbagai aspek dan masalah masalah kenegaraan.
2. Memiliki komitmen moral terhadap sistem nilai yang sedang berlangsung.
3. Berorientasi kepada kepentingan negara.
4. Memiliki kedewasaan emosi (*emotional intelligence*)
5. Jauh dari sikap hipokrit (*cognitive dissonance*)

Dalam perjalannya program kampung tangguh semeru ini yang menjadi komunikator utama di Desa Kertosari adalah Kepala Desa karena mempunyai pengaruh dan juga wewenang tertinggi untuk mengatur mengelola dalam roda pemerintahan di desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

<sup>61</sup>Desa adalah desa yang bisa disebut dengan nama lain dari adat, kemudian yang dimaksud desa adalah sejumlah masyarakat yang memiliki hukum serta memiliki batas batasan wilayah yang berwenang dalam mengatur, mengelola dan mengatur urusan pemerintah desa, kepentingan didalam masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak tradisional atau hak

---

<sup>60</sup> Ibid 46

<sup>61</sup> Undang-undang (UU) tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. 2014

asal usul yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.<sup>62</sup>

Agen utama dalam komunikator ini adalah struktur birokrasi suatu kebijakan berjalan dengan baik dengan struktur birokrasi yang menjadi penting dalam Implementasi Kebijakan sendiri. Pada aspek Struktur birokrasi mencakup 2 hal penting seperti mekanisme dan struktur organisasi pelaksanaan sendiri. Struktur organisasi pada Kebijakan Kampung Tangguh Semeru kertosari dibentuk melalui Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kecamatan kepada Kelurahan hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Tantoko Endro selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan kegiatan seperti ini pastinya kita memiliki mekanisme sendiri ya mas karena memang itu penting dalam sebuah kebijakan, jadi kita memang sudah membentuk kepala satgas di setiap RW dengan menunjuk secara tertulis yang menetapkan Ketua RW menjadi Kepala Satgas di masing-masing wilayahnya tujuannya memang untuk mempermudah koordinasi antara yang satu dengan yang lainnya”<sup>63</sup>- Tantoko Endro

Hal tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua RW 05 Dusun Tambak Suruh yang mengatakan bahwa :

“Memang benar mas kita sebagai Ketua RW langsung ditunjuk menjadi Ketua Satgas dan setiap koordinator satgasnya juga langsung di tunjuk oleh pak lurah mas”<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat struktur organisasi yang memang dibagi dalam setiap tugasnya dan hal tersebut langsung

<sup>62</sup> Undang-Undang RI, *Pasal 1 Ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, 2.

<sup>63</sup> Wawancara, Tantoko Endro. Kepala desa kertosari. 2022

<sup>64</sup> Wawancara, munim. Ketua RW 05 dusun tambak suruh. 2022

ditunjuk oleh kelurahan masing-masing.

Meskipun Kepala Desa menjadi komunikator utama dalam mempengaruhi masyarakat agar bergerak bersama sama untuk menerapkan program tersebut, beliau juga mengkoordinir 10 kepala dusun yang berada di Desa Kertosari untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian komunikasi politik terhadap masyarakat.

Berdasarkan undang-undang tersebut diatas, telah jelas bahwa Pemerintah Desa mempunyai wewenang lebih luas dalam menjaga serta mengatur satuan wilayah kepemimpinannya, terutama masalah pandemi COVID-19 bagaimana strategi untuk menghadapi pandemi yang sedang berjalan. berdasarkan arahan dan himbauan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait penanganan kasus pandemi tersebut

#### 4. Pesan

Dalam berjalannya komunikasi politik Pemerintah Desa Kertosari untuk bergerak bersama sama melawan COVID-19, unsur pesan atau informasi juga tidak kalah pentingnya karena pesan adalah suatu materi yang dimiliki oleh sumber atau komunikator untuk ditujukan kepada masyarakat sebagai komunikasi dari program kampung tangguh semeru.

Pesan merupakan gagasan atau ide yang disampaikan komunikator kepada komunikan untuk tujuan tertentu. Pesan yang disampaikan bisa berupa nasihat, perintah, permintaan yang disampaikan secara verbal ataupun non-verbal, terselubung atau bahkan terang-terangan, disadari atau pun tidak dan tentunya mengandung unsur politik. Sebagaimana



dijelaskan dibagian komunikator politik, komunikator harus memerhatikan kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat yang akan dijadikan sebagai komunikan. Berhubungan dengan itu, relevansi pesan dengan keadaan komunikasi harus memerhatikan strategi penyampaian pesan politik baik dengan membuka forum interaksi, diskusi, terbuka atau terselubung dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.<sup>65</sup>

Ragam pesan ditentukan sesuai dengan kegunaan pesan itu sendiri, apakah ditujukan untuk memberikan informasi secara umum, menyampaikan pendidikan, perekonomian dan politik. Sebagaimana telah dijelaskan diawal dalam bagian informasi. Dalam komunikasi politik, pesan politik terbagi menjadi dua bagian pragmatis dan ideologis:

1. Pesan praktis atau pragmatis

Pesan ini disampaikan oleh komunikator kepada komunikan agar melakukan tindakan yang berguna untuk kepentingan politik sesaat.

Misalnya mengajak masyarakat untuk memilih partainya pada saat pemilu. Penyampaian pesan bertujuan agar komunikan melakukan tindakan dalam momen tertentu. Hal ini juga memungkinkan keterlibatan aktif maupun kesadaran mendalam bagi masyarakat.

2. Pesan ideologis

Pesan yang berisi pemahaman dan informasi tentang cita-cita politik dalam membentuk kehidupan ekonomi dan hubungan politik yang

---

<sup>65</sup> Effendy, Onong. U. 2009. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

lebih baik. Pesan politik ideologis biasanya disampaikan oleh kekuatan politik ideologis yang tidak semata-mata ingin memenangkan pertarungan politik untuk memenangkan kemenangan sesaat. Keuntungan pesan politik ideologis adalah berguna bagi proses penyadaran politik dan memungkinkan munculnya partisipasi politik aktif dari masyarakat.

Dalam hal ini Pemerintah Desa membuat pesan atau informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat pragmatis, karena Kepala Desa Kertosari mempunyai ambisi tinggi agar masyarakatnya terhindar dari paparan virus COVID-19. Adapun gejala yang dialami atau tanda awal terpapar infeksi virus COVID-19 ini adalah mulai dari gejala gangguan pernapasan seperti demam, batuk, kelelahan, peradangan, kehilangan fungsional indera perasa hingga sesak nafas. Sedangkan masa inkubasi terinfeksi gejala virus ini biasanya terjadi 5 sampai 6 hari dengan masa inkubasi batuk, kehilangan fungsional indera perasa, demam dan sesak nafas. Bahkan virus COVID-19 dapat menyebabkan meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Tantoko Endro selaku Kepala Desa Kertosari, beliau memaparkan bahwa:

“iya mas, jadi saya waktu itu menggerakkan seluruh warga kertosari untuk melawan COVID-19 dengan menjalankan program kampung tangguh semeru ini. Memang ini merupakan bencana yang datang secara tiba-tiba dan dampak yang diakibatkan begitu amat sangat besar juga baik bagi dirisendiri maupun keluarga”.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Tantoko Endro, Wawancara oleh Penulis, Oktober 2022.

Pesan politik pada dasarnya hanyalah perlu memperhatikan intensitas dan pokok persoalan yang dihadapi. Maksudnya pesan dibuat untuk apa, apakah ditujukan untuk kebutuhan pribadi (*personal needs*) atau kelompok (*social need*). Pesan politik hanya akan menarik perhatian selama ia memberikan harapan atau hasil yang kuat dan relevansinya dengan persoalan kebutuhan.

Ada 2 model dalam penyusunan pesan, yakni penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan bersifat persuasif.

1. Penyusunan pesan bersifat informatif

Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi, sederhana, jelas dan tidak banyak menggunakan jargon yang kurang populer di kalangan masyarakat.

Model penyusunan pesan informatif biasanya banyak dilakukan dalam penulisan berita dan artikel oleh para wartawan dengan memakai model piramida terbalik. Dalam penulisan berita model *straight news*, penyampaian pesan bergerak dari yang sangat penting kepada yang kurang penting.

2. Penyusunan pesan bersifat persuasif

Model penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap dan pendapat khalayak. Oleh karena itu penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki sebuah

proposisi. Proposisi disini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikan, artinya setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan.

#### 5. Media saluran

Proses politik memerlukan saluran dan media komunikasi yang tepat. Saluran dan media komunikasi politik sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam proses serta aktivitas politik sekarang ini. Kebutuhan saluran dan media dalam proses politik adalah upaya yang serius agar pesan politik dapat menjadi konsumsi publik serta menjangkau khalayak luas.

Sekarang ini hampir tidak ada peristiwa politik yang tidak melibatkan media. Saluran politik sangat diperlukan dalam upaya ketersediaan keragaman aktivitas komunikasi politik agar sampai kepada masyarakat.

Media saluran dalam proses komunikasi politik, berperan dalam segala level sosial. Level sosial menciptakan level komunikasi politik yang pada dasarnya merupakan ruang-ruang yang membutuhkan informasi politik sesuai dengan kebutuhan dan karakter masing-masing di tengah proses komunikasi politik. Berikut merupakan model saluran komunikasi politik, diantaranya:<sup>67</sup>

##### a. Komunikasi Massa.

Dalam proses transformasi informasi yang mengandung muatan politik diperlukan komunikasi massa yang sesuai dan tepat sehingga sasaran pesan mampu tercapai. Komunikasi massa adalah proses saat komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan

---

<sup>67</sup> Effendy, Onong. U. 2009. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

menciptakan makna yang diharapkan dapat memengaruhi khalayak yang berbeda-beda melalui berbagai cara.

Media massa merupakan alat komunikasi politik yang memiliki dua dimensi, yaitu bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam dimensi pemerintah, media massa berfungsi sebagai berikut:

1. Menyebarkan informasi seperti :
  - a. Kebijakan pemerintah. Mengingat kondisi kurang memungkinkan untuk terlalu sering bertatap muka maka dari itu komunikasi pemerintah desa kertosari dalam menyampaikan pesan melalui media masa. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hendrik selaku RT Dusun Sidomulyo,
 

“jadi kepala desa menyampaikan informasi dari kebijakan pemerintah, seperti tidak terlalu untuk sering keluar rumah kecuali memang benar- benar penting”<sup>68</sup> – Hendrik
  - b. Update kondisi masyarakat, sebagai jalinan informasi yang sifatnya urgent dan mendadak. Hasil diskusi bersama masyarakat mengatakan bahwa :
 

“Ketika ada warga yang terpapar maupun sedang mengalami gejala virus COVID-19, pemerintah desa dan tim satgas bisa menangani dengan cepat”<sup>69</sup>-Hidayati

Dilihat dari hasil wawancara diatas pemerintah desa memeberikan akses komunikasi yang mudah dan cepat. Pemerintah desa juga menanam kepercayaan masyarakat agar tidak takut untuk ukut

---

<sup>68</sup> Wawancara, warga desa kertosari. Kutorejo.2022

<sup>69</sup> Wawancara, warga desa kertosari. Kutorejo.2022

berpartisipasi dalam pelaksanaan program vaksinasi yang sudah diagendakan oleh pemerintah desa.

b. Komunikasi Interpersonal.

Komunikasi interpersonal merupakan bentuk hubungan komunikasi saling tukar kata lisan di antara dua orang atau lebih. Saluran ini bisa berbentuk tatap muka atau berperantara. Beberapa teoretikus dan ilmuwan komunikasi, seperti Joseph Klapper, Elihu Katz, Paul Lazarsfeld, dan Ithiel de La Solapool, telah mencatat betapa efektifnya komunikasi interpersonal, terutama bagi negara berkembang yang lebih tinggi tingkat frekuensinya dalam menggunakan tenaga manusia dibanding menggunakan produk teknologi canggih. Walaupun demikian, komunikasi interpersonal juga memiliki kelemahan, seperti jangkauan sasaran (komunikatif) yang terlalu luas atau karena dibatasi letak geografis yang sulit dijangkau.<sup>70</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, Kepala Desa kertosari menggunakan komunikasi politik interpersonal yaitu membuat forum perkumpulan dari kelompok agen komunikator mulai dari struktur birokrasi sampai pada tim satgas COVID desa. Karena komunikasi ini dinilai lebih efektif dari pada menggunakan komunikasi dengan sebuah alat teknologi canggih berupa whatsapp atau yang lainnya.

---

<sup>70</sup> Wahid Umaimah, "KOMUNIKASI POLITIK Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru" (Bandung: 2006),

c. Komunikasi Organisasi.

Jaringan komunikasi organisasi menggabungkan sifat-sifat saluran massa dan saluran interpersonal. Tentu saja terdapat jenis-jenis organisasi yang sangat berbeda dalam politik, baik formal maupun informal.<sup>71</sup> Yang dimaksud kelompok informal adalah keluarga, kelompok sebaya, dan rekan kerja yang semuanya memainkan peran penting dalam mengembangkan opini politik. Kelompok formal meliputi staff pemerintahan desa atau birokrasi desa, tim Satgas COVID-19 dan organisasi kepemudaan masyarakat.

Untuk saluran media politik pemerintah desa dalam penerapan kampung tangguh semeru ini menggunakan media massa yang berupa sosial media whatsapp grup dan media komunikasi interpersonal maksudnya, Kepala Desa membuat forum atau rapat untuk strategi dalam penanggulangan bencana pandemi COVID-19.

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bapak Heri selaku

SATGAS COVID-19, bahwa:

“jadi kita membuat grup whatassap dengan nama Kertosari Bangkit COVID-19 dengan tujuan untuk mempermudah penyampain pesan politik dan juga mempermudah koordinir massa, lalu kita juga menjalankan beberapa kali rapat agar masyarakat semakin paham. Kan kadang itu mas, orang-orang itu angger scroll chat aja jadi untuk meminimalisir gagalnya faham kita membuat forum pertemuan atau rapat, tapi wajib menerapkan yang namanya protokol kesehatan mulai dari jaga jarak sampai memakai masker”

---

<sup>71</sup> Syahril Syarbaini, Teori, Media Dan Strategi Komunikasi Politik. Jakarta, Juni 2021

## 6. Penerima

Komunikan atau masyarakat adalah penerima informasi perseorangan atau kelompok yang dijadikan objek oleh komunikator. Komunikan akan memberikan umpan balik pada komunikator. Komunikan juga diartikan sebagai pihak yang pasif dan menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah Kualitas pesan, maksudnya pesan yang disampaikan harus diukur dengan mengkaji terlebih dahulu komunikan agar pesan bisa diterima oleh komunikan.<sup>72</sup>

Komunikan adalah nama lain dari penerima, penerima yang dimaksud adalah orang yang menerima pesan dari sumber. Komunikan inilah yang akan mengartikan pesan verbal atau non-verbal tersebut berdasarkan pengalaman, rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir dan perasaannya.

“Masyarakat disini banyak yang merespon positif, terhadap kebijakan yang sudah buat. Meskipun diawal pelaksanaan ada beberapa masyarakat kurang terima atau takut dengan yang namanya virus corona”<sup>73</sup> - Tantoko Endro

Terkait dengan pesan yang disampaikan yang menyangkut menjadi sasaran dari pesan yang dari komunikator. Masyarakat merupakan bagian dari kelompok penerima pesan yang disalurkan oleh komunikator. Masyarakat menjadi target dari komunikator maka dari itu sangat penting pesan tersebut tersampaikan kepada masyarakat.

---

<sup>72</sup> Eriyanto, Analisis Framing, Cet. 4 (Yogyakarta: Pt. Lkis Pelangi Aksara, 2008), 38.

<sup>73</sup> Wawancara, Kepala Desa Kertosari. Kutorejo, 2022



## 7. Efek atau dampak

Efek komunikasi adalah dampak dari beragam bentuk pesan atau komunikasi yang ditransformasikan dalam interaksi komunikasi bagi target audiens yang menjadi sasaran (*exposed*) media dan saluran politik lainnya. Efek media terdiri atas efek langsung (*immediate effect*) dan efek tidak langsung atau tertunda (*delayed effect*). Efek media bersifat positif dan negatif. Efek komunikasi langsung adalah efek komunikasi yang muncul pada saat bersamaan dengan publikasi isi media. Sedangkan efek tidak langsung atau tertunda adalah efek yang muncul setelah publikasi isi media pada media lama (*old media*), seperti media cetak dan elektronik.

Efek atau dampak merupakan suatu keniscayaan dalam komunikasi. Setiap proses komunikasi memiliki tujuan, begitu pula dengan komunikasi politik. Efektivitas komunikasi dinilai dari seberapa jauh kesamaan antara komunikator dan komunikan, apakah sama pada tataran pengetahuan atau informasi, sikap, hingga tindakan atau perilaku. Hal inilah yang dikonsepsikan sebagai dampak komunikasi. Dampak penyampaian pesan melalui media massa terhadap khalayak, menurut Onong Uchjana Effendy dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>74</sup>

### 1) Kognitif

Efek Kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif. Melalui media massa, seseorang atau khalayak

---

<sup>74</sup> Umaimah. Efek Komunikasi Politik: Teori, konsep, dan aplikasi di era media baru, Bandung, 2016. Hal.116

memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat. Khalayak mendapat informasi dari beragam media mengenai perilaku para politikus (Presiden, Menteri, Anggota Parlemen, dan Pengurus Partai) yang berperilaku korup, tidak mempunyai komitmen dengan janji-janji politik mereka, suka jalan-jalan ke luar negeri, dan sebagainya. Semua itu menjadi pengetahuan khalayak bahwa yang namanya politikus cenderung korup, tidak tepat janji, semena-mena dengan uang dan fasilitas negara, serta mengabaikan fungsi utama melayani kepentingan rakyat. Efek kognitif membentuk pengetahuan seseorang mengenai sebuah isu dan merupakan informasi yang digunakan dalam mempertimbangkan atau mengambil suatu keputusan.<sup>75</sup>

## 2) Afektif Efek

Efek ini kadarnya lebih tinggi dari efek kognitif. Komunikan yang terkena dampak afektif mulai memberi sikap terhadap suatu informasi, tidak berhenti pada tataran tambahan pengetahuan (kognitif). Tujuan komunikasi politik bukan hanya memberitahu kepada khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, melainkan lebih dari itu, setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Contoh, setelah kita mendengar, menonton, atau membaca informasi mengenai anggota DPR yang menerima suap dan dihukum, muncul perasaan jengkel, kasihan, atau malah senang. Perasaan jengkel atau marah

---

<sup>75</sup> Umaimah. Efek Komunikasi Politik: Teori, konsep, dan aplikasi di era media baru, Bandung, 2016. Hal.118

dapat diartikan sebagai perasaan kesal terhadap perbuatan anggota DPR yang sudah memperoleh gaji besar dan beragam fasilitas. Perasaan senang adalah perasaan lega dari para pembenci dan pejuang antikorupsi bahwa hukuman tersebut diharapkan dapat membuat jera koruptor.<sup>76</sup>

### 3) Konatif atau behavioral

Efek konatif behavioral berkaitan dengan perilaku komunikan setelah proses komunikasi berlangsung. Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Iklan politik atau pidato dan perilaku para politikus yang ditayangkan televisi dapat membuat khalayak atau masyarakat pada akhirnya tidak terlalu percaya terhadap mereka. Perilaku politikus yang berdebat secara tidak pantas memungkinkan mengubah khalayak menjadi apatis dengan politik.

Namun, tayangan tersebut juga dapat menimbulkan keprihatinan khalayak tertentu sehingga muncul efek positif, seperti gerakan mengampanyekan politik yang beretika. Efek pada level behavioral merupakan efek level tertinggi. Dalam proses politik, efek ini sangat disukai oleh komunikator politik karena pilihan yang dilakukan oleh publik adalah ukuran terpilih atau tidaknya seorang kandidat politik.

Efek atau respon dari masyarakat mengenai program kampung tangguh semeru ini memperoleh respon yang baik maksudnya masyarakat Desa Kertosari mengikuti arahan dari pimpinan Kepala Desa untuk

---

<sup>76</sup> Ibid., 117

besama-sama bergerak memutus persebaran virus COVID-19 dengan menerapkan kampung tangguh semeru serta antusias dari masyarakat juga tinggi mulai dari kelas pelajar sampai pada masyarakat kalangan tua.

#### 8. Penerapan Kampung Tangguh Semeru di Desa Kertosari

Kampung tangguh semeru merupakan program yang di inisiasi oleh polda Jawa Timur yang kemudian di adaptasi di tiap-tiap daerah untuk mengurangi penyebaran Pandemi COVID-19 di Wilayah Jawa Timur yang kemudian diterapkan di Desa Kertosari dan disini terdapat dalam beberapa aspek, diantaranya:

##### a. Sumber Daya Manusia

Dalam penerapan program kampung tangguh semeru ini pasti membutuhkan tenaga manusia. Seperti pendapat Kepala Dusun Tambak Suruh, yakni:

”Untuk SDM sendiri sudah sangat memadai karena dari warga sekitar juga turut berperan aktif dalam menerapkan Kampung Tangguh Semeru namun hal ini hanya berlangsung di awal penerapan Kampung Tangguh saja karena setelah penilaian selesai warga mulai tidak lagi seaktif saat pertama kali program ini berjalan”.<sup>77</sup>

Pendapat lain juga disampaikan oleh Kepala Dusun Sidomulyo yang mengatakan bahwa:

“SDM disini sudah cukup maksimal mas, bahkan mulai dari kalangan pelajar yang ada diwilayah ini pun turut membantu dalam penerapan Kampung Tangguh Semeru”.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Kepala Dusun Tambak Suruh, Wawancara oleh Penulis, Oktober 2022.

<sup>78</sup> Kepala Dusun Sidomulyo, Wawancara oleh Penulis, Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Sumber Daya Manusia merupakan pondasi terpenting dalam penerapan program namun bantuan dari pemerintah juga memiliki peran sendiri dalam Implementasi kebijakan program.

b. Sumber Daya Finansial

Selain sumber daya manusia pada Implementasi juga ada Sumber daya financial yang biasanya berupa dukungan dana dari Pemerintah maupun dari pelaksana kebijakan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Tantoko Endro selaku Kepala Desa Kertosari, beliau memaparkan bahwa:

“Dana pada Implementasi Kampung Tangguh Semeru ini didapatkan dari Swadaya Masyarakat dan juga dari kas Warga Kertosari serta adanya dukungan dana dari Donatur, untuk bantuan dana dari Pemerintah sendiri pada awal Pelaksanaan tidak memberikan sokongan dana apapun kepada kita”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dalam kasus pendanaan masyarakat tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah sehingga menjadikan masyarakat mulai sedikit keberatan dalam pelaksanaan program Kampung Tangguh Semeru ini untuk dilanjutkan sampai benar –benar steril dari virus COVID-19.

c. Sarana dan Prasarana

Selain adanya Sumber daya manusia dan Sumber daya finansial yang turut membantu keberhasilan dari program Kampung Tangguh Semeru, ada juga Sumber daya sarana dan prasana yang bisa digunakan sebagai

---

<sup>79</sup> Kepala Desa Kertosari, Wawancara oleh Penulis, Oktober 2022.

fasilitas penunjang Implementasi Kampung Tangguh Semeru di Desa Kertosari. Sebagaimana pemaparan dari Bapak Heri selaku Ketua Satgas COVID 19 di Desa Kertosari, bahwa:

“ Untuk sarana dan prasana yang menjadi fasilitas Kampung Tangguh Semeru, kita Warga Kertosari menyediakan sesuai dengan arahan pemerintah seperti adanya lumbung pangan, posko keamanan, alat disinfektan, masker, dan juga peralatan – peralatan lainnya yang turut menunjang program”.<sup>80</sup>

Dari wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa menurut Bapak Heri selaku Ketua Satgas COVID 19 dalam penerapan Kampung Tangguh Semeru di Desa Kertosari yang sesuai dengan arahan pemerintah Kampung Tangguh harus memiliki sarana dan prasana yang dipenuhi seperti adanya lumbung pangan, posko keamanan, ruang isolasi dan berbagai peralatan protokol kesehatan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>80</sup> Sekretaris Desa Kertosari, Wawancara oleh Penulis, Oktober 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menganalisis pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik Pemerintah Desa Kertosari dalam penerapan program kampung tangguh semeru ditandai dengan antusias masyarakat untuk bergerak bersama – sama untuk melawan COVID-19 sesuai dengan isi dari komunikasi politik dari Kepala Desa Kertosari, yang mana pada saat itu COVID-19 sedang menjadi permasalahan dalam berbagai macam negara termasuk negara Indonesia khususnya di daerah yang sudah saya teliti yaitu Desa Kertosari.

Keberhasilan dari komunikasi politik ini ditandai dengan penyampaian komunikator yang baik dari pemerintah desa sampai pada masyarakat. Seperti tingkat partisipasi masyarakat yang untuk mau bekerjasama melawan covid 19 dengan menerapkan program kampung tangguh semeru yang diantaranya, pembagian masker, penyemprotan desinfektan disetiap rumah warga, pos cek point, sampai pada pembagian sembako pada masyarakat yang kurang mampu.

Karena komunikasi politik tersebut membutuhkan kerjasama strategis dari berbagai elemen yang bertujuan untuk mempercepat penyebarluasan informasi pada masyarakat dan mengakomodasi masukan serta respon dari masyarakat tentang kebijakan pemerintah di tengah pandemi Covid-19

Hasil dari komunikasi politik pemerintah desa juga berdampak di sektor ekonomi politik dengan ditandai adanya penyaluran sembako pada masyarakat yang sangat berdampak seperti kehilangan sumber matapencarian, dan menyalurkan komunikasi tentang pentingnya dari partisipasi politik karena hak satu suara dapat menentukan kondisi ekonomi politik kedepan.

Walaupun Kepala Desa sudah menjalankan komunikasi politik dengan tujuan masyarakat mengikuti intruksi dari pemerintah desa, akan tetapi masih ada saja masyarakat yang meremehkan akan hal itu. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut pemerintah desa terus membuat berbagai macam strategi seperti mencari aktor-aktor komunikasi politik yang masuk dalam kriteria seperti Staf Pemerintah Desa, Jajaran Kepala Dusun dan TIM SATGAS COVID Desa. Aktor komunikasi politik ini dibuat dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya dari COVID-19 dan juga pentingnya menjaga kesehatan baik diri sendiri maupun keluarga.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan memberikan saran mengenai penerapan program kampung semeru di Desa Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Adapun saran yang peneliti berikan adalah seharusnya Pemerintah Daerah memberikan bantuan dari segi finansialnya bukan hanya dari segi SDM saja. Karena suatu program pastinya membutuhkan materi untuk bisa dijalankan secara tepat dan cepat. Hal ini dibuktikan ketika Pemerintah Desa kesulitan untuk mencari dana guna



menerapkan program kampung tangguh semeru. Sehingga partisipasi masyarakat menurun karena alasan finansial.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Atikah Nur Hidayati. “Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggapi Dampak COVID-19 di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* Vol.13 No. 1 (2021).
- Aurick Yudha Negara, dkk. *Pedoman Pengoperasian Kampung Tangguh (Langkah Sistematis Melawan Pandemi COVID-19)*, 2020.
- Eriyanto. *Analisis Framing*. Cet. 4. Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2008.
- Farida Nurfalih. “Sosialisasi Strategi Komunikasi Layanan Aparatur Desa Pada Situasi Pandemi COVID-19 di Desa Argasunya Kota Cirebon.” *Jurnal UMT (Universitas Muhammadiyah Tangerang)* Vol. 2 (2020).
- Gerry R.J. Wonok. “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan).” *Jurnal Politico*, 2020.
- Gigih Arifani Setiawan. “Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Penyebaran COVID-19 di Desa Bedadung Kabupaten Jember.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Kementrian Kesehatan RI. “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.” Diakses 20 Maret 2021. <https://COVID19.kemkes.go.id/protokol-COVID-19/kmk-no-hk-01-07-menkes-413-2020-ttg-pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-COVID-19>.
- Kepala Desa Kertosari. Wawancara oleh Penulis, Oktober 2022.
- Kepala Dusun Sidomulyo. Wawancara oleh Penulis, Oktober 2022.
- Kepala Dusun Tambak Suruh. Wawancara oleh Penulis, Oktober 2022.

- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Norma Setiyana. “Peran Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).” Skripsi, UIN Raden Intan, 2021.
- Nugroho. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: CV. Sarnu Untung, 2003.
- Putri Noviyanti Ririn. “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 20 No. 2 (Juli 2020).
- Risma Khaerati. “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Penanganan COVID-19 di Kabupaten Gowa.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2021.
- S. Nasution. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sartika R. “Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat dalam Penanganan COVID-19 di Desa Rappoala Kabupaten Gowa.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Sekretaris Desa Kertosari. Wawancara oleh Penulis, Oktober 2022.
- Sri Ulina. “Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal Perspektif* Vol. 4 No.2 (Juli 2016).
- Suharsimi, dan Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Tantoko Endro. Wawancara oleh Penulis, Oktober 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Pasal 1 Ayat (1) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Menteri Hukum dan HAM, 2014.

Virgilius Triyanto Agun. “Kebijakan Pemerintah Desa di Masa Pandemi COVID-19 Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul DIY Yogyakarta.” Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Desa “APMD,” 2020.

Wiryanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi Politik*. Jakarta: Grasindo, 2004.

Umaimah. *Efek Komunikasi Politik: Teori, konsep, dan aplikasi di era media baru*, Bandung , 2016. Hal.116



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A